

SKRIPSI

DANA PERIMBANGAN DAN ALOKASI BELANJA MODAL SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP KETIMPANGAN DAERAH DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

MIRAH MIDADAN



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2015**

SKRIPSI

DANA PERIMBANGAN DAN ALOKASI BELANJA MODAL SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP KETIMPANGAN DAERAH DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

Disusun dan diajukan oleh

**MIRAH MIDADAN
A11111009**



Kepada

**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2015**

SKRIPSI

DANA PERIMBANGAN DAN ALOKASI BELANJA MODAL SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP KETIMPANGAN DAERAH DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

Disusun dan diajukan oleh:

MIRAH MIDADAN

A111 11 009

Telah diperiksa dan disetujui untuk di uji

Makassar, 24 Februari 2015

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Hj. Rahmatia, SE., MA

NIP. 19630625 198703 2 001

Dr. Sultan Suhab, SE., M.Si

NIP. 19691215 199903 1 002

**Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin**

Drs. Muh. Yusri Zamhuri, MA., PhD

NIP. 19610806 198903 1 004

SKRIPSI

DANA PERIMBANGAN DAN ALOKASI BELANJA MODAL SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP KETIMPANGAN DAERAH DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

disusun dan diajukan oleh

MIRAH MIDADAN
A11111009

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **24 Februari 2015** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. Hj. Rahmatia, SE., MA	Ketua	1
2.	Dr. Sultan Suhab, SE., M.Si	Sekretaris	2
3.	Dr. H. Abd. Hamid Paddu, MA	Anggota	3
4.	Dr. H. Agussalim, SE., M.Si	Anggota	4
5.	Dr. H. Abd. Rahman Razak, SE., MS.	Anggota	5

Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. Muh. Yusri Zamhuri, MA., PhD
NIP. 19610806 198903 1 004

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Mirah Midadan
NIM : A11111009
Jurusan/program studi : Ilmu Ekonomi/Strata 1

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

DANA PERIMBANGAN DAN ALOKASI BELANJA MODAL SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP KETIMPANGAN DAERAH DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 24 Februari 2015
Yang membuat pernyataan,

Mirah Midadan

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin. Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat dukungan, bantuan, dan masukan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini penulis hendak mengucapkan terimakasih kepada:

- Kedua orangtua, ayahanda Imam Mujahidin Fahmid dan ibunda Rika Moestikasari, serta seluruh keluarga besar atas segala doa, dukungan secara moril maupun material serta segala jenis tekanan dan desakan sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin.
- Ibu Prof. Dr. Hj. Rahmatia, SE., MA selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis sekaligus sebagai Penasehat Akademik dan Pembimbing I, penulis ucapkan terimakasih atas segala arahan, bantuan, nasehat serta waktu yang telah diluangkan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
- Bapak Dr. Sultan Suhab, SE., M.Si selaku Pembimbing II, penulis sangat berterimakasih atas segala pemikiran, ide, bantuan, arahan, nasehat, kesabaran, serta waktu yang diluangkan demi penyelesaian skripsi ini.
- Dosen penguji, Bapak Abd. Hamid Paddu, Bapak Yusri Zamhuri, Bapak Rahman Razak serta Bapak Agussalim atas saran dan kritik terhadap hasil

penelitian ini sehingga membuat tulisan ini menjadi lebih baik dari sebelumnya.

- Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah membagikan ilmunya kepada penulis, terimakasih atas pembelajaran dan bantuan selama tahun kuliah penulis.
- Seluruh staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah banyak membantu penulis dalam segala macam hal terkait dokumen akademik.
- Seluruh teman-teman angkatan 2011 Fakultas Ekonomi, terkhusus jurusan Ilmu Ekonomi 2011 – Regalians, yang telah menjadi keluarga baru bagi penulis. Terimakasih atas segala waktu dan dukungannya, teruntuk Adila, Jihan, Ria, Nana, Dani, Kiki, Dayat, Zuhail, Asrul, Akbar, Richard, Fadli dan semuanya, terimakasih telah membagi waktu bersama dan menjadi tempat berkeluh kesah terbaik selama ini. Kakanda Spultura, terimakasih atas segala saran dan arahnya, terimakasih Kak Wawan, Kak Eva, Kak Muthi dan lainnya yang telah membagi ilmunya dan membantu penulis semasa kuliah.
- AIESEC LC UNHAS. *This year we created a history in AIESEC Indonesia! Thank for elected me as the member in this awesome organization. Thanks you very much for my greatest team ever in AIESEC, Dhinta Wulandari, Mustika, Juan, Ririw, Jidah, Ida, Irfan and Vera. You guys gave me lot of spirit and experiences! For all of the AIESECers in LC UNHAS that I can't mentioned one by one, thank you for every single thing and time that we already spent and shared together. Push your limit, leaders!*
- Seluruh peserta MAWAPRES 2014, terimakasih atas segala ilmu yang telah dibagi bersama dan atas segala kompetisi yang telah dilalui. Sukses!

- Seluruh teman-teman KKN tematik Jogja 2014. Terimakasih atas seluruh momen dan pengalaman selama di Jogja. Tidak lupa pula, penulis ucapkan terimakasih kepada teman-teman UGM yang menjadi bagian dari keluarga GK-12, terimakasih atas kehangatannya sebagai keluarga yang sekarang terpisahkan jarak dan pulau. Teruntuk Adi, Ayu, Juna dan Bamsky, terimakasih atas dukungan dan semangatnya. Khususnya untuk pondokan Jepitu serta Arky Rinaldy yang telah meluangkan waktu dan tenaga ekstra dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas dorongan, semangat, dan doa yang tiada henti untuk penulis.
- Seluruh teman-teman *Student Exchange in Kyoto University, Japan, 2014*.
Thank you for the sweet memorable experiences in Japan. Hope we will separate into another countries and continents soon and I will visit you there, guys.

Terakhir, penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Makassar, 24 Februari 2015

Mirah Midadan

ABSTRAK

Dana Perimbangan dan Alokasi Belanja Modal serta Implikasinya terhadap Ketimpangan Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan

Mirah Midadan

Rahmatia

Sultan Suhab

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menganalisis pengaruh dana perimbangan dan belanja modal terhadap ketimpangan daerah secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan metode regresi linear berganda dengan data panel dari seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan dan melalui pendekatan Fixed Effect Model (FEM) serta Random Effect Model (REM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama periode penelitian, variabel dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap ketimpangan daerah secara langsung dan variabel belanja modal berpengaruh negatif terhadap ketimpangan daerah secara langsung. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap ketimpangan daerah secara langsung. Di lain sisi, variabel dana perimbangan dan belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kata kunci: Dana Perimbangan, Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan daerah.

ABSTRACT

Funds Balance and Capital Expenditure Allocation and Its Allocation on Regional Disparities in South Sulawesi

Mirah Midadan

Rahmatia

Sultan Suhab

This research aims to measure and analyze the effect of funds balance and the capital expenditure on regional disparities directly and indirectly through the economic growth. This study used multiple linear regression method with the pooled data from all of districts/cities in South Sulawesi Province by means of Fixed Effect Model (FEM) and Random Effect Model (REM) approached. The result shows during the period of this research, the variable of equalization funds were not affected on regional disparities and the variable of capital expenditure adversely effected the regional disparities. Also the variable of economic growth shows the positive affected on the regional disparities. On the other hand, the variable of funds balance and capital expenditure were positively affected the inequalities regional.

Keywords: Funds Balance, Capital Expenditure, Economic Growth, Regional Disparities.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	xviii
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Tinjauan Teoretis.....	13

2.1.1	Perdebatan Teori Dana Perimbangan	13
2.1.2	Perdebatan Teori Belanja Modal	15
2.1.3	Perdebatan Teori Pertumbuhan Ekonomi.....	19
2.1.4	Perdebatan Teori Ketimpangan Daerah	22
2.1.5	Hubungan Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Daerah.....	24
2.1.6	Hubungan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Daerah.....	26
2.1.7	Hubungan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Daerah	28
2.2	Studi Empiris	30
2.3	Kerangka Konseptual	32
2.4	Hipotesis	34
BAB III METODE PENELITIAN.....		35
3.1	Lokasi Penelitian	35
3.2	Jenis dan Sumber Data	35
3.3	Metode Analisis	35
3.3.1	Analisis Regresi.....	36
3.3.2	Indeks Williamson	37
3.4	Pengujian Kriteria Statistik.....	38
3.4.1	Pengujian Signifikansi Stimultan (Uji F)	39
3.4.2	Pengujian Signifikansi Parameter Individual (Uji t).....	40
3.4.3	Koefisien Determinasi (R^2)	40

3.5	Definisi Operasional	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		43
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	43
4.1.1	Kondisi Geografis	43
4.1.2	Kondisi Demografis	43
4.1.3	Indikator Ekonomi Makro Daerah	48
4.2	Perkembangan Variabel Penelitian	55
4.2.1	Perkembangan Dana Perimbangan di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013	55
4.2.2	Perkembangan Belanja Modal di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013	57
4.2.3	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2014	60
4.2.4	Perkembangan Ketimpangan Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013	62
4.3	Hasil Analisis Ekonometrika	64
4.3.1	Pengujian Statistik Model Y_1	64
4.3.2	Pengujian Statistik Model Y_2	65
4.4	Analisis Hasil	66
4.5	Pembahasan	70
4.5.1	Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Ketimpangan Daerah	70
4.5.2	Pengaruh Belanja Modal terhadap Ketimpangan Daerah	73

BAB V PENUTUP	77
5.1 Kesimpulan	77
5.2 Saran	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN	84

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007-2011	9
Tabel 4.1 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 dan Tahun 2013	45
Tabel 4.2 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013	47
Tabel 4.3 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota (Juta Rupiah) Provinsi Sulawesi Selatan, 2009-2013	49
Tabel 4.4 PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2009-2013 (Rupiah)	52
Tabel 4.5 Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011-2013	54
Tabel 4.6 Realisasi Dana Perimbangan (Juta Rupiah) di Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009-2013	56
Tabel 4.7 Realisasi Belanja Modal (Juta Rupiah) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2009-2013	59
Tabel 4.8 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi (%) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2009-2013	61
Tabel 4.9 Perkembangan Indeks Williamson Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2009-2013	63

Tabel 4.10 Pengaruh Dana Perimbangan, Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2009-2013	67
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	33
Gambar 4.1 Kerangka Konseptual dengan Hasil Estimasi	69

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	85
Lampiran 2	89
Lampiran 3	92
Lampiran 4	96

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Ketimpangan (disparitas) regional merupakan salah satu bagian kecil dari masalah ketimpangan yang sebenarnya lebih luas di setiap negara berkembang. Ketimpangan regional merupakan suatu aspek yang umum terjadi di setiap negara baik negara berkembang maupun negara maju. Ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda (Sjafrizal, 2008).

Dengan timbulnya perbedaan kemampuan dalam pembangunan ekonomi, maka tidak heran jika terdapat kategori wilayah maju dan wilayah berkembang dari setiap daerah. Ketimpangan ini membawa dampak terhadap kesejahteraan masyarakat antar wilayah tersebut dan mempunyai implikasi terhadap formulasi kebijakan pembangunan wilayah yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat. Menurut Myrdal (1976) bahwa adakalanya daerah-daerah yang maju memiliki dan membina kondisi-kondisi alamiah yang sangat baik bagi pemusatan kegiatan-kegiatan ekonomi di daerah tersebut, dalam banyak hal mereka melakukannya pada saat mereka hendak mulai memanfaatkan kondisi menguntungkan yang kompetitif.

Sesuai dengan amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa tujuan akhir pembangunan ekonomi adalah masyarakat adil dan makmur. Pengertian adil dan makmur sebenarnya relatif, sehingga sukar

diberi batas kuantitatif. Namun, demikian jelas bahwa yang dikehendaki masyarakat Indonesia adalah pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat dan hasil pertumbuhan dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat (Harun dan Ghozali, 2012).

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Todaro (2000) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang setinggi-tingginya bukan merupakan satu-satunya tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan ekonomi, tetapi pembangunan ekonomi harus pula berupaya untuk menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan dan tingkat pengangguran. Upaya penghapusan kemiskinan dan berkembangnya ketidakmerataan di segala aspek merupakan inti permasalahan pembangunan. Lebih lanjut, ketidakmerataan diungkapkan dalam berbagai permasalahan seperti ketidakmerataan kekuasaan, prestise, status, kepuasan kerja, kondisi kerja, tingkat partisipasi, kebebasan untuk memilih, dan lain-lain (Arsyad, 1988).

Di negara-negara sedang berkembang, perhatian utama terfokus pada dilema kompleks antara pertumbuhan versus ketimpangan. Keduanya sama-sama penting, namun hampir selalu sulit diwujudkan bersamaan. Pengutamaan yang satu akan menuntut dikorbankannya yang lain. Pembangunan ekonomi mensyaratkan *Gross National Product* (GNP) yang tinggi dan untuk itu tingkat pertumbuhan yang tinggi merupakan pilihan yang harus diambil. Namun yang menjadi masalah bukan hanya soal bagaimana cara memacu pertumbuhan, tapi siapa yang melaksanakan dan berhak menikmati hasil-hasilnya. Penanggulangan ketimpangan regional dan kemiskinan kini merupakan masalah pokok dalam pembangunan dan sasaran utama kebijakan pembangunan di banyak negara (Todaro, 2000).

Di sisi lain, pertumbuhan (*growth*) dan pemerataan (*equality*) merupakan dua unsur penting dalam proses pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Akan tetapi kenyataan menunjukkan bahwa diantara kedua aspek tersebut seringkali terjadi *trade off* antara satu dan lainnya, yaitu bilamana mendahulukan pemerataan maka akan cenderung memperlambat proses pertumbuhan (Sjafrizal, 2008).

Ketimpangan merupakan suatu gambaran terhadap fakta atau kondisi yang tidak homogen, yang di dalamnya terdapat perbedaan-perbedaan yang membutuhkan perhatian. Kesenjangan antarwilayah di Sulawesi Selatan tidak terlepas dari adanya keragaman potensi sumber daya alam, letak geografis, kualitas sumber daya manusia, ikatan etnis atau politik. Keberagaman ini dapat menjadi sebuah keunggulan dalam satu sisi, namun disisi lain dapat berpotensi menjadi sumber instabilitas sosial dan politik nasional. Untuk itu, penyelenggaraan pembangunan secara terencana dan berorientasi terhadap pengurangan kesenjangan antarwilayah menjadi sangat penting untuk dilakukan (Bappenas, 2013).

Lebih lanjut dalam publikasi Bappenas (2013) menyebutkan bahwa kesenjangan yang terjadi di suatu daerah akan menimbulkan berbagai permasalahan, seperti peningkatan migrasi dari daerah miskin ke daerah yang lebih maju, kriminalitas dan konflik antar masyarakat. Dalam konteks kenegaraan, kesenjangan akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang kemudian akan mengancam kebutuhan suatu negara. Maka dari itu, kesenjangan harus diatasi oleh pemerintah dengan mendorong daerah tertinggal untuk mampu mengejar ketertinggalan perekonomiannya terhadap daerah yang sudah maju.

Pada masa pemerintahan Orde Baru, proses pembangunan dilaksanakan secara sentralistik. Pemerintah pusat menempatkan dirinya sebagai penggerak utama dalam upaya akselerasi pembangunan hingga pelosok tanah air. Berbagai kebijakan pembangunan diputuskan secara terpusat dengan instrumen utamanya Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Sentralisasi berbagai keputusan pada pemerintah pusat semakin memperbesar inefisiensi, karena banyak proyek-proyek yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh daerah (Harun dan Ghozali, 2012).

Proses pembangunan yang sentralistik tersebut membuat ketimpangan regional yang sangat mencolok antara Kawasan Indonesia Barat dengan Kawasan Indonesia Timur, antara Pulau Jawa dengan luar Pulau Jawa, bahkan di dalam Pulau Jawa sendiri ada ketimpangan wilayah antara kota dengan kabupaten (Sjafrizal, 2008). Setelah runtuhnya masa Orde Baru, selanjutnya dimulailah masa Otonomi Daerah dimana proses pembangunan menjadi desentralistik. Otonomi Daerah ditandai dengan dikeluarkannya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Pelaksanaan kedua Undang-Undang tersebut secara resmi dimulai pada tanggal 1 Januari 2001. Kedua Undang-Undang tersebut kemudian diamandemen menjadi UU No. 32 dan No. 33 tahun 2004.

Desentralisasi merupakan sebuah alat untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, khususnya dalam rangka memberikan pelayanan umum yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Desentralisasi dapat diwujudkan dengan pelimpahan kewenangan kepada tingkat pemerintahan di bawahnya untuk melakukan pembelanjaan, kewenangan untuk memungut pajak (*taxing power*), terbentuknya Dewan yang dipilih oleh rakyat,

Kepala Daerah yang dipilih oleh DPRD, dan adanya bantuan dalam bentuk transfer dari Pemerintah Pusat (Sidik, 2002).

Dengan adanya pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, maka pemerintah daerah wajib melaksanakan pembangunan ekonomi di daerahnya masing-masing. Pembangunan ekonomi pada hakekatnya merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama-sama dengan masyarakatnya dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal untuk merangsang perkembangan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah.

Desentralisasi fiskal merupakan komponen utama dari segala bentuk desentralisasi. Apabila pemerintah daerah melaksanakan fungsinya secara efektif dan mendapat kebebasan dalam pengambilan keputusan pengeluaran di sektor publik, maka pemerintah daerah harus mendapat dukungan sumber-sumber keuangan yang memadai baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal dan adanya kebutuhan pendanaan daerah yang cukup besar, pemerintah memberikan dana perimbangan dan salah satu komponen dana ini yang paling memberikan kontribusi terbesar adalah Dana Alokasi Umum. Dana perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN, terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintah daerah.

Dana Bagi Hasil berperan sebagai penyeimbang fiskal antara pusat dan daerah dari pajak yang dihasilkan. Kemudian Dana Alokasi Umum berperan

sebagai pemerata fiskal antar daerah (*fiscal equalization*) di Indonesia. Serta Dana Alokasi Khusus berperan sebagai dana yang didasarkan pada kebijakan yang bersifat darurat.

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No. 32 tahun 2004). Adanya transfer dana dari pusat ini diharapkan pemerintah daerah bisa mengalokasikan PAD yang didapatnya untuk membiayai belanja modal di daerahnya.

Dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah selain DAU adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (UU No. 33 tahun 2004). Dana Alokasi Khusus ini penggunaannya diatur oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk kegiatan pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, infrastruktur jalan dan jembatan, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum dan sanitasi, prasarana pemerintah daerah, lingkungan hidup, kehutanan, saran prasarana pedesaan, perdagangan, pertanian serta perikanan dan kelautan yang semuanya itu termasuk dalam komponen belanja modal dan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk mengalokasikan dana pendamping sebesar 10% dari nilai DAK yang diterimanya untuk mendanai kegiatan fisik (Wandira, 2013).

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang diberikan pemerintah yang bersumber dari penerimaan pajak negara dan penerimaan pengelolaan sumber daya daerah oleh pemerintah. Besar kecilnya jumlah dana yang diberikan

ditentukan oleh pemerintah didasarkan pada presentase yang telah ditetapkan kepada kabupaten dan kota.

Menurut McEachern dalam Harun dan Ghozali (2012) pengeluaran pemerintah adalah salah satu bentuk kebijakan fiskal. Sejalan dengan pendapat tersebut, sesuai dengan UU No. 33 tahun 2004 pasal 66, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki beberapa macam fungsi antara lain: fungsi otorisasi; perencanaan; pengawasan; alokasi; dan distribusi. Fungsi alokasi dan distribusi yang dimiliki APBD diharuskan dapat mengalokasikan serta mendistribusikan seluruh sumber daya, kesempatan dan hasil ekonomi secara optimal dan adil. Oleh karena itu, peran pemerintah dapat dilihat dari pengeluaran APBD.

Pengalokasian sumber daya ke dalam anggaran belanja modal sebenarnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan publik akan sarana dan prasarana umum yang disediakan oleh pemerintah daerah, namun adanya kepentingan politik dari lembaga legislatif yang terlibat dalam penyusunan proses anggaran menyebabkan alokasi belanja modal terdistorsi dan sering tidak efektif dalam memecahkan masalah di masyarakat (Wandira, 2013). Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif (Yovita, 2011). Pemanfaatan belanja lebih baik dialokasikan untuk hal-hal produktif, misalnya

untuk melakukan aktivitas pembangunan, kemudian penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program layanan publik (Darwanto dan Yulia, 2007). Pendapat ini menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja untuk berbagai kepentingan publik.

Rendahnya belanja modal dapat mempengaruhi kinerja berbagai badan pemerintah. Belanja modal merupakan faktor penting dalam meningkatkan perekonomian, sehingga perlu intervensi layanan pemerintah mencakup rendahnya tingkat pencairan anggaran (Wandira, 2013).

Pada umumnya, pembangunan daerah difokuskan pada pembangunan ekonomi melalui usaha pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan peningkatan produksi barang dan jasa, yang antara lain diukur dengan besaran yang disebut Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Faktor utama yang menentukan pertumbuhan ekonomi daerah adalah adanya permintaan barang dan jasa dari luar daerah, sehingga sumber daya lokal akan dapat menghasilkan kekayaan daerah karena dapat menciptakan peluang kerja di daerah.

Tingkat dan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan didukung oleh sektor-sektor usaha yang berkembang di daerah. Tingkat dan laju pertumbuhan ekonomi tersebut tidak terlepas dari perkembangan kinerja dan struktur perekonomian Sulawesi Selatan. Sektor ekonomi yang mendominasi perekonomian Sulawesi Selatan dari tahun ke tahun tetap di pegang oleh sektor pertanian, industri, jasa dan perdagangan. Namun meski memiliki proporsi yang cukup besar dalam perekonomian, sektor pertanian dan industri cenderung mengalami penurunan peran dari tahun ke tahun. Kecenderungan ini akan

berakibat pada semakin seriusnya persoalan rendahnya kesempatan kerja dan pengangguran terbuka.

Pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan yang cukup tinggi merupakan suatu prestasi yang membanggakan, namun di sisi lain dapat dilihat bahwa ketimpangan yang terjadi juga semakin besar. Hal ini dapat dilihat dari data Tabel 1.1 dan Grafik 1.1 tentang perbandingan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan dengan ketimpangan di Sulawesi Selatan untuk tahun 2007-2011.

Tabel 1.1
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007 – 2011

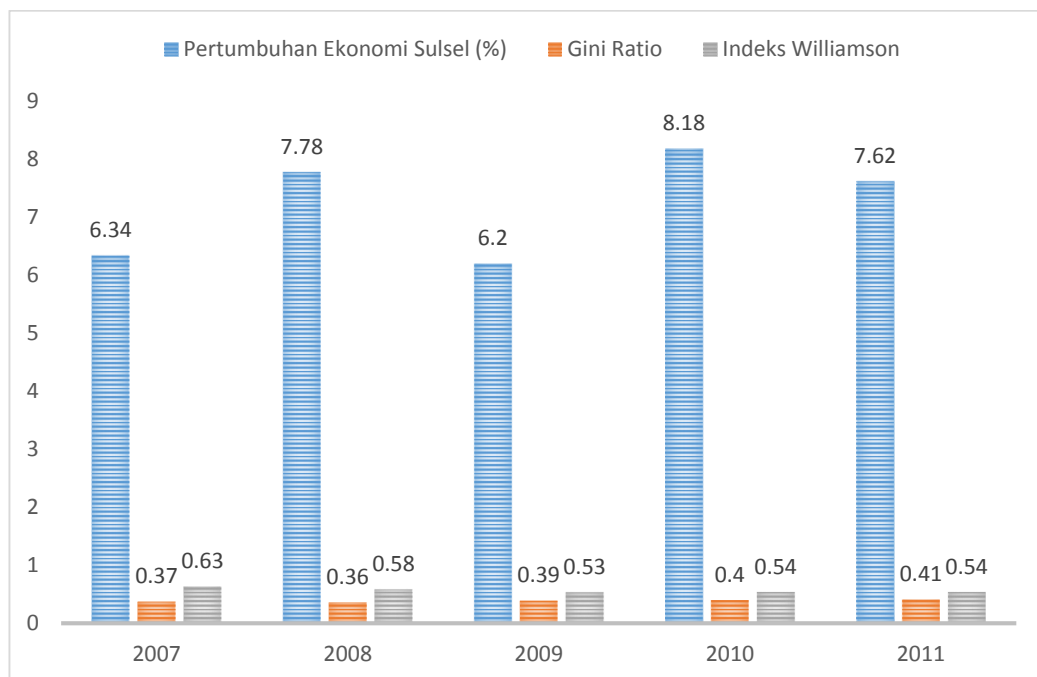
Tahun	Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan (%)	Gini Ratio	Indeks Williamson
2007	6,34	0,37	0,63
2008	7,78	0,36	0,58
2009	6,20	0,39	0,53
2010	8,18	0,40	0,54
2011	7,62	0,41	0,54

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan (diolah)

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun. Begitu pula dengan tingkat ketimpangan yang terjadi, baik itu ketimpangan pendapatan maupun ketimpangan wilayah. Kenyataan ini semakin memperkuat pernyataan Sjafrizal (2008) bahwa akan terjadi *trade off* diantara pertumbuhan dan pemerataan dalam proses pembangunan ekonomi.

Perkembangan pertumbuhan ekonomi serta ketimpangan yang terus menerus meningkat pada Grafik 1.1. Seiring meningkatnya pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan bahkan menempati posisi diatas rata-rata pertumbuhan nasional, tidak dapat dihindari kenyataan ketimpangan yang terjadi dan semakin besar. Menjadi salah satu tugas bersama untuk mengurangi besarnya jurang ketimpangan yang terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan, karena tentu saja memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Grafik 1.1
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007 – 2011



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan (diolah)

Permasalahan dari pemerintah adalah pertumbuhan daerah yang tinggi biasanya tidak diimbangi dengan pemerataan. Berdasarkan data yang diolah dari BPS Sulawesi Selatan, menunjukkan pengaruh positif bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi justru semakin membuat ketimpangan yang besar.

Perekonomian Sulawesi Selatan mampu tumbuh diatas pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Sulawesi Selatan terus mengalami kemajuan. Meskipun perekonomian di Sulawesi Selatan menunjukkan tren positif, tetapi berdasarkan data indeks Gini dan indeks Williamson menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi tidak diimbangi dengan pemerataan distribusi pendapatan dan pembangunan antar wilayah.

Ketimpangan regional masih menjadi persoalan yang penting untuk diatasi. Apabila ketimpangan tidak segera diselesaikan, maka masalah ini akan menimbulkan masalah baru lainnya bagi kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pengaruh dari Dana Perimbangan dan Belanja Modal pada Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Daerah di Sulawesi Selatan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka akan disajikan rumusan masalah:

1. Apakah dana perimbangan berpengaruh langsung terhadap ketimpangan daerah dan secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan.
2. Apakah belanja modal berpengaruh langsung terhadap ketimpangan daerah dan secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mengukur dan menganalisis berapa besar pengaruh dana perimbangan terhadap ketimpangan daerah secara langsung dan tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan.
2. Untuk mengukur dan menganalisis berapa besar pengaruh belanja modal terhadap ketimpangan daerah secara langsung dan tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:

1. **Pengambil Kebijakan**

Bagi pengambil kebijakan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang berguna di dalam memahami faktor ketimpangan daerah di Sulawesi Selatan sehingga dapat diketahui faktor-faktor yang perlu dipacu untuk mengatasi masalah ketimpangan daerah.

2. **Ilmu Pengetahuan**

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu ekonomi khususnya ekonomi pembangunan. Manfaat khusus bagi ilmu pengetahuan yakni dapat melengkapi kajian mengenai ketimpangan daerah dengan mengungkap secara empiris faktor-faktor yang mempengaruhinya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoretis

2.1.1 Perdebatan Teori Dana Perimbangan

Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah merupakan suatu sistem hubungan keuangan yang bersifat vertikal antara pemerintah pusat dan daerah (*intergovernmental fiscal relation system*) sebagai konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah dalam bentuk penyerahan sebagian wewenang pemerintah. Sistem pembiayaan penyelenggaraan pemerintah pusat dan daerah ini diatur dalam UU No. 33 Tahun 2004. Kebijakan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah dilakukan dengan mengikuti pembagian kewenangan. Hal ini berarti bahwa hubungan keuangan antara pusat dan daerah perlu diberikan pengaturan sedemikian rupa, sehingga kebutuhan pengeluaran yang akan menjadi tanggung jawab daerah dapat dibiayai dari sumber-sumber penerimaan yang ada (Ristriardani, 2011).

Selanjutnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, kepada daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak/retribusi (*tax assignment*) dan pemberian bagi hasil penerimaan (*revenue sharing*) serta bantuan keuangan (*grant*) atau dikenal dengan dana perimbangan.

Dalam UU Nomor 33 tahun 2004 disebutkan bahwa dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana

Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana perimbangan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta antar-pemerintah daerah.

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi (Ristriardani, 2011). Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum merupakan *block grant* yang diberikan kepada semua kabupaten dan kota dengan tujuan mengisi kesenjangan antara kapasitas fiskal dan kebutuhan fiskal daerah.

Pendistribusian Dana Alokasi Umum (DAU) ditentukan berdasarkan formula baku yang ditetapkan berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Prinsip penentuan DAU secara umum mengindikasikan bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih besar daripada daerah yang sudah maju (Kuncoro, 2004). Dana Alokasi Khusus (DAK) atau *specific grants* merupakan jenis transfer yang memiliki persyaratan tertentu terkait di dalam bantuan tersebut (Ristriardani, 2011). Bentuk transfer pemerintah pusat ini diberikan untuk mendorong pemerintah daerah dalam menambah barang dan jasa publik tertentu sesuai dengan program pemerintah pusat, tanpa harus membebani pembiayaan dari Pemda. Meskipun dalam rangka meningkatkan keluasaan daerah, bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat lebih banyak bersifat *block grants*, bukan *specific grants* (Mardiasmo, 2002).

Berawal dari teori pemilihan publik yang berakar dari aliran Neo Klasik, Oates (1972) berpendapat bahwa desentralisasi dapat meningkatkan efisiensi dalam hal alokasi sumber daya yang dapat memuaskan kebutuhan dan prioritas atau pilihan warga lokal melalui pengetahuan yang lebih baik dari pilihan tersebut. Sedangkan Tiebout (1956) berpendapat bahwa kemampuan individu untuk bergerak diantara kekuasaan hukum yang ada, memberikan mereka solusi dalam hal penyelesaian masalah barang publik lokal.

Teori Neo Klasik merupakan akar dari teori pemilihan publik dan menganggap dengan adanya desentralisasi maka akan meningkatkan kompetisi antar wilayah dalam hal pertumbuhan ekonomi. Sedangkan kebijakan sentralisasi tidak dapat memaksimalkan dan mengefisiensikan pendapatan negara sebaik sistem desentralisasi (Carlos Gil Canaleta *et al*, 2004).

Berbeda dengan pandangan Keynesian yang berpendapat bahwa kebijakan desentralisasi akan mengurangi kapasitas pemerintah pusat dalam menggunakan *demand policy* untuk mengurangi efek dari adanya fluktuasi produksi dan lapangan kerja. Sentralisasi juga memungkinkan lebih efisien, terutama dalam hal pencapaian tujuan ekonomi secara makro, dapat mengurangi difusi dalam melaksanakan instrumen-instrumen kebijakan dan sistem kordinasi yang lebih baik pula (Carlos Gil Canaleta *et al*, 2004).

2.1.2 Perdebatan Teori Belanja Modal

Belanja modal merupakan salah satu komponen belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kebutuhan investasi. Belanja modal yaitu pengeluaran yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan dapat menambah aset pemerintah yang selanjutnya meningkatkan biaya pemeliharaan (Mardiasmo, 2009).

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang membuat manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah dimana aset tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja dan bukan untuk dijual (PMK No. 91/PMK/06/2007). Sedangkan menurut Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-33/PB/2008 yang dimaksud dengan belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Belanja modal dapat dikategorikan menjadi lima kategori utama, yaitu Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, serta Belanja Modal Fisik lainnya. Jumlah nilai belanja yang dikapitalisasi menjadi aset tetap adalah semua belanja yang dikeluarkan sampai dengan aset tersebut siap digunakan atau biaya perolehan (Syaiful, 2006).

Berdasarkan uraian tersebut, maka belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah yang sekaligus mencerminkan pula kebijakan pemerintah yang diambil. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Mangkoesobroto, 1994).

Pengeluaran pemerintah mempunyai dasar teori yang dapat dilihat dari identitas keseimbangan pendapatan nasional, yaitu $Y = C + G + I + (X-M)$ yang

merupakan sumber legitimasi pandangan Keynesian akan relevansi campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Dari persamaan tersebut dapat ditelaah bahwa kenaikan atau penurunan pengeluaran pemerintah akan berpengaruh terhadap naik atau turunnya pendapatan nasional. Banyak pertimbangan yang mendasari pengambilan keputusan pemerintah dalam mengatur pengeluarannya. Pemerintah tidak cukup hanya meraih tujuan akhir dari setiap kebijaksanaan pengeluarannya melainkan harus tetap memperhitungkan sasaran yang akan menikmati kebijakan tersebut. Memperbesar pengeluaran dengan tujuan semata-mata untuk meningkatkan pendapatan nasional atau memperluas kesempatan kerja adalah tidak memadai. Melainkan harus diperhitungkan siapa yang akan terpekerjakan atau meningkat pendapatannya. Pemerintah pun perlu menghindari agar peningkatan perannya dalam perekonomian tidak melemahkan kegiatan pihak swasta (Dumairy, 1997).

Teori perkembangan pengeluaran pemerintah dapat ditilik dari sisi makro dan mikro. Secara makro, Rostow dan Musgrave menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang kemudian dibedakan menjadi tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi menjadi besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti misalnya pendidikan, bangunan, dan sebagainya. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin besar. Namun peranan pemerintah tetap besar pada perkembangan ekonomi tahap menengah sebab peranan swasta yang juga semakin besar banyak menimbulkan kegagalan pasar.

Pada tahap lanjut, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti misalnya program hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat, dan sebagainya. Teori ini adalah suatu pandangan yang ditimbulkan dari pengamatan berdasarkan pembangunan ekonomi yang dialami oleh banyak negara tetapi tidak didasarkan oleh suatu teori tertentu (Mangkoesebroto, 2008).

Menurut Wagner yang mengungkapkan suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam persentase terhadap GNP yang juga didasarkan pada pengamatan di negara-negara Eropa, US dan Jepang pada abad ke-19. Wagner mengungkapkan pendapatnya dalam suatu hukum bahwa dalam suatu perkonomian, apabila pendapatan perkapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Dasar dari hukum tersebut adalah pengamatan empiris dari negara-negara maju, tetapi hukum tersebut memberi dasar akan timbulnya kegagalan pasar dan eksternalitas (Mangkoesebroto, 2008).

Teori Peacock dan Wiseman memberikan pandangan bahwa pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Peacock dan Wiseman mendasarkan teori tersebut pada teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin

besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar (Mangkoesoebroto, 2008).

Kemudian dari sisi mikro sendiri, perkembangan pengeluaran pemerintah dilihat dari sisi penentuan permintaan dan penentuan tingkat output. Penentuan permintaan yang dimaksud adalah interaksi yang terjadi antara permintaan dan penawaran untuk barang publik serta menentukan jumlah barang publik yang akan disediakan melalui anggaran belanja. Sedangkan dari sisi penentuan tingkat output, barang dan jasa publik yang disediakan oleh pemerintah sangat ditentukan oleh politisi yang memilih jumlah barang dan jasa yang dihasilkan. Selain itu, para politisi juga menentukan jumlah pajak yang akan dikenakan pada masyarakat untuk membiayai barang dan jasa publik tersebut. Dalam hal menentukan barang dan jasa publik apa yang akan disediakan, para politisi sangat memperhatikan selera masyarakat dengan tujuan memuaskan keinginan masyarakat sehingga tetap memilih mereka sebagai wakil masyarakat (Mangkoesoebroto, 2008).

2.1.3 Perdebatan Teori Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sadono Sukirno dalam Ristiardani (2011), pertumbuhan dan pembangunan ekonomi memiliki definisi yang berbeda, yaitu pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Dengan demikian, makin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator lain yaitu distribusi pendapatan. Pembangunan ekonomi ialah usaha meningkatkan pendapatan perkapita dengan jalan mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi riil melalui penanaman modal, penggunaan

teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan keterampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen.

Secara umum, pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Istilah pertumbuhan ekonomi menerangkan atau mengukur prestasi dan perkembangan suatu perekonomian. Pertumbuhan ekonomi dapat juga diartikan sebagai kenaikan GDP atau GNP tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak (Arsyad, 1999). Menurut Kuznet dalam Jhingan (2000), terdapat enam ciri pertumbuhan ekonomi yang berdasarkan pada produk nasional dan komponennya, yaitu (1) Laju pertumbuhan penduduk dan produk perkapita; (2) Peningkatan produktivitas; (3) Laju perubahan struktural yang tinggi; (4) Urbanisasi; (5) Ekspansi negara maju; dan (6) Arus barang, modal, dan orang antar bangsa. Keenam ciri pertumbuhan ekonomi tersebut saling berkaitan satu sama lain, yang terjalin dalam urutan sebab akibat.

Menurut pandangan klasik (Adam Smith, David Ricardo, Malthus, dan Mill) terdapat empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu: (1) Jumlah penduduk; (2) Jumlah stok barang-barang modal; (3) Luas tanah dan kekayaan alam; serta (4) Tingkat teknologi yang digunakan (Boediono, 1988). Pada masa ekonomi klasik, para ekonom berargumen bahwa sistem ekonomi pasar bebas yang akan menciptakan efisiensi, membawa ekonomi kepada kondisi *full employment* dan menjamin pertumbuhan ekonomi sampai tercapai posisi stationer. Pemerintah tidak perlu terlalu mencampuri urusan perekonomian, hal yang perlu dilakukan pemerintah adalah memberi kebebasan kepada setiap orang

untuk berusaha, tidak membuat peraturan yang menghambat pergerakan orang dan barang, menjaga keamanan dan ketertiban. Pemerintah juga perlu menyediakan berbagai fasilitas sarana dan prasarana sehingga para pengusaha dan investor dapat beroperasi dengan efisien. Dengan gambaran keadaan seperti itu diharapkan pertumbuhan ekonomi daerah akan tercapai.

Menurut Nafziger (1997) dalam Ristriardani (2011) faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah penduduk (tenaga kerja), pendidikan, pembentukan modal (investasi dan perkembangan teknologi), kewirausahaan dan sumber daya alam. Pertambahan penduduk akan mendorong pertumbuhan tenaga kerja. Semakin besar jumlah tenaga kerja akan meningkatkan jumlah output yang dihasilkan dalam perekonomian. Tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi yang selalu dipakai dalam proses produksi. Perannya dipengaruhi oleh keterampilan, tingkat pendidikan, daya kreasi tinggi yang dimiliki, akan cenderung meningkatkan produktivitasnya. Meningkatnya produktivitas tenaga kerja dalam bentuk meningkatnya output yang dihasilkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Namun, menurut Malthus, penduduk akan menghambat pembangunan ekonomi. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan penduduk akan lebih cepat dibandingkan persediaan sumber daya alam yang ada. Pandangan ini telah mengabaikan peranan dari perkembangan teknologi, akumulasi modal, pengendalian tingkat kelahiran dan lainnya yang sebenarnya mampu mengelola jumlah sumber daya alam dalam hal ini adalah makanan bagi penduduknya. Nafziger juga mengungkapkan bahwa tingkat pendidikan penduduk atau tenaga kerja adalah faktor pendorong pertumbuhan ekonomi yang lain. Faktor lain yang

dikemukakan adalah sumber daya alam. Negara dengan sumber daya alam yang besar belum tentu memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan sebaliknya.

Untuk lebih mengetahui ada tidaknya peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka pertumbuhan ekonomi dihitung dengan data pendapatan nasional perkapita atas dasar harga konstan karena pertumbuhan pendapatan nasional dapat terjadi tanpa memberi dampak positif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini terjadi sebagai akibat dari tingkat pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi daripada tingkat pertumbuhan pendapatan nasional (Ristriardani, 2011).

2.1.4 Perdebatan Teori Ketimpangan Daerah

Dengan adanya pertumbuhan ekonomi baik secara langsung dan tidak langsung akan berpengaruh terhadap masalah ketimpangan regional. Menurut Neo Klasik, ketimpangan pembangunan wilayah terjadi karena adanya perbedaan sumberdaya, tenaga kerja, dan modal yang dimiliki oleh tiap daerah adalah berbeda-beda. Hipotesa Neo Klasik merupakan dasar teoritis terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah. Termasuk dalam hal ini adalah hasil studi dari Williamson yang melakukan pengujian terhadap kebenaran teori Neo Klasi tersebut. Menurut Neo Klasik, ketimpangan akan berkurang dengan sendirinya. Neo Klasik berpendapat bahwa dalam awal pembangunan yang dilaksanakan di negara yang sedang berkembang, kesempatan dan peluang pembangunan yang ada umumnya di manfaatkan oleh daerah-daerah yang kondisi pembangunannya sudah lebih baik. Sedangkan daerah-daerah yang masih sangat terbelakang tidak mampu memanfaatkan peluang karena

keterbatasan sarana dan prasarana serta rendahnya kualitas sumber daya manusia (Harun dan Ghozali, 2012).

Kebenaran hipotesa Neo Klasik ini kemudian diuji oleh Williamson pada tahun 1966 melalui studi tentang ketimpangan pembangunan antar wilayah pada negara maju dan sedang berkembang. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hipotesa Neo Klasik yang diformulasikan secara teoretis ternyata terbukti benar secara empirik. Ini berarti bahwa proses pembangunan suatu negara tidak otomatis dapat menurunkan ketimpangan wilayah, tetapi pada tahap awal pembangunan justru sebaliknya (Harun dan Ghozali, 2012).

Selain itu, ada pula penelitian mengenai ketimpangan antar daerah yang dilakukan oleh Kuznet dalam meneliti kesenjangan. Ia meneliti kesenjangan di berbagai negara secara *cross sectional* dan menemukan pola U terbalik. Kuznet menyimpulkan bahwa pendapatan rata-rata perkapita pada awal perkembangan negara masih rendah, dan tingkat kesenjangan juga rendah. Ketika pendapatan rata-rata naik, maka kesenjangan juga meningkat. Kemudian ketika pendapatan rata-rata naik lebih tinggi, maka kesenjangan akan turun kembali (Todaro, 2004).

Myrdal (1957) melakukan penelitian tentang sistem kapitalis yang menekankan kepada tingkat keuntungan bagi suatu wilayah yang memberikan harapan tingkat keuntungan tinggi akan berkembang menjadi pusat-pusat perkembangan kesejahteraan. Perbedaan tingkat kemajuan ekonomi antar daerah yang berlebihan akan menyebabkan pengaruh yang merugikan (*backwash effect*) mendominasi pengaruh yang menguntungkan (*spread effect*) terhadap pertumbuhan daerah, dalam hal ini akan mengakibatkan ketidakseimbangan. Pelaku-pelaku yang mempunyai kekuatan pasar secara normal akan cenderung meningkat, sehingga mengakibatkan ketimpangan antar daerah (Arsyad, 2002).

Menurut Sjafrizal (2008), faktor-faktor penyebab terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah: (1) Perbedaan kandungan sumber daya alam; (2) Perbedaan kondisi demografis; (3) Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa; (4) Konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah; dan (5) Alokasi dana pembangunan antar wilayah.

2.1.5 Hubungan Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Daerah

Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik (Widjaja, 2002). Secara umum, tujuan pemerintah pusat melakukan transfer dana kepada pemerintah daerah adalah: (1) Sebagai tindakan nyata untuk mengurangi ketimpangan pembagian “kue nasional” baik vertikal maupun horizontal; (2) Suatu upaya untuk meningkatkan efisiensi pengeluaran pemerintah dengan menyerahkan sebagian kewenangan dibidang pengelolaan keuangan negara dan agar manfaat yang dihasilkan dapat dinikmati oleh rakyat di daerah yang bersangkutan (Elmi, 2002).

Namun selama ini sumber dana pembangunan daerah di Indonesia mencerminkan ketergantungan terhadap sumbangan dan bantuan dari pemerintah pusat (Sumiyarti dan Imamy, 2005). Sejalan dengan itu, Elmi (2002) juga menyebutkan bahwa ketidakseimbangan fiskal (*fiscal imbalance*) yang terjadi antara pemerintah pusat dan daerah selama ini telah menyebabkan ketergantungan keuangan pemerintah daerah kepada bantuan dari pemerintah

pusat yang mencapai lebih dari 70 persen kecuali DKI Jakarta. Padahal sebenarnya, bantuan dana dari pemerintah pusat tersebut hanyalah untuk rangsangan bagi daerah agar lebih meningkatkan sumber penerimaan pendapatan asli daerahnya, yang merupakan bagian penting dari sumber penerimaan daerah.

Beberapa tujuan pemerintah pusat memberikan dana bantuan dalam bentuk *grant* kepada pemerintah daerah yaitu: (1) Untuk mendorong terciptanya keadilan antar wilayah (*geographical equity*); (2) Untuk meningkatkan akuntabilitas (*promote accountability*); (3) Untuk meningkatkan sistem pajak progresif; (4) Untuk meningkatkan pajak daerah (Mardiasmo, 2002). Desentralisasi merupakan bagian dari strategi setiap institusi yang berkehendak untuk tidak mati dalam persaingan global. Demikian pula bagi sebuah negara. Desentralisasi menjadikannya terbagi menjadi bagian-bagian kecil yang terintegrasi dan menjadi sebuah makhluk organik yang bergerak efisien mengatasi tantangan global.

Menurut Prawiseto dalam Najiah (2013) desentralisasi fiskal adalah pendelegasian tanggung jawab dan pembagian keputusan dibidang fiskal yang meliputi aspek penerimaan (*tax assignment*) maupun aspek pengeluaran (*expenditure assignment*). Desentralisasi fiskal ini dikaitkan dengan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam penyediaan barang dan jasa publik. Diberlakukannya desentralisasi mungkin akan menghasilkan lebih banyak efisiensi, namun juga dapat mengurangi stabilitas ekonomi dan memperburuk ketimpangan regional (Carlos Gil Canaleta *et al*, 2004).

Pembelanjaan infrastruktur dan sektor sosial oleh pemerintah daerah lebih memacu pertumbuhan ekonomi daripada kebijakan pemerintah pusat. Pemerintah daerah memiliki kelebihan dalam membuat anggaran pembelanjaan sehingga

lebih efisien dengan memuaskan kebutuhan masyarakat karena lebih mengetahui keadaannya. Penelitian yang dilakukan oleh Pusporini dalam Iskandar (2012) menunjukkan bahwa dana perimbangan secara signifikan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Variabel dalam penelitian ini direpresentasikan dalam proksi berupa pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota dan dana perimbangan.

2.1.6 Hubungan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Daerah

Pembangunan sarana dan prasarana oleh pemerintah daerah berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi (Kuncoro, 2004). Syarat fundamental untuk pembangunan ekonomi adalah tingkat pengadaaan modal pembangunan yang seimbang dengan pertambahan penduduk. Bertambahnya infrastruktur dan perbaikannya oleh pemerintah daerah diharapkan akan memacu pertumbuhan ekonomi daerah.

Pembelian barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah cenderung relatif stabil dalam menghadapi variasi pendapatan nasional yang bersifat siklis. Banyak pengeluaran sudah disetujui oleh peraturan sebelumnya, sehingga hanya sebagian kecil saja yang dapat dirubah oleh pemerintah. Perubahan kecil tersebut dilakukan dengan sangat lambat. Sebaliknya, konsumsi dan pengeluaran swasta untuk investasi cenderung bervariasi sejalan dengan pendapatan nasional. Semakin besar peran pengeluaran pemerintah dalam suatu perekonomian, makin kecil kadar ketidakstabilan siklis pada seluruh pengeluaran. Meningkatnya peran pemerintah dalam perekonomian dapat saja merugikan atau menguntungkan (Harun dan Ghazali, 2012).

Penelitian yang dilakukan oleh Ismail dan Hamzah (2006) menunjukkan hasil bahwa belanja pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan pada 26 provinsi di Indonesia periode 1992-2002. Adapun hasil penelitian Anasmen (2009) terhadap Kabupaten/Kota di Sumatera Barat menunjukkan bahwa belanja modal pemerintah tidak signifikan berpengaruh positif terhadap PDRB, tetapi investasi swasta berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan PDRB.

Desentralisasi fiskal di Indonesia dimulai pada tahun 2001. Dengan demikian, telah terjadi perubahan struktural dimana pada era sebelumnya pengelolaan keuangan dilakukan secara sentralistik kemudian berubah menjadi desentralisasi. Dengan dilakukannya desentralisasi maka daerah memiliki kewenangan dalam menetapkan pengeluaran pemerintah daerah yang terdapat dalam APBD. Sesuai yang dikatakan Sjafrizal (2008), bahwa dalam mengatasi ketimpangan wilayah dapat dilakukan dengan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, mendorong transmigrasi dan migrasi spontan, pembangunan pusat-pusat pertumbuhan yang baru di daerah berskala kecil, dan kebijakan fiskal wilayah yang mendukung penyelesaian masalah ketimpangan. Maka dalam upaya penyelesaian masalah ketimpangan tersebut, diperlukan pengeluaran pemerintah daerah yang sudah terkordinir yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah berskala kecil.

Berbeda dengan pendapat Sjafrizal (2008), kebijakan desentralisasi fiskal yang berlaku di China sangat ketat. Pemerintah pusat di China membuat suatu sistem *Hukou* dimana masyarakat yang bermigrasi dari daerah pedesaan ke kota ataupun dari provinsi tertinggal ke provinsi yang lebih maju adalah perbuatan

illegal. Pemerintah pusat China sangat mengontrol pergerakan dan perpindahan masyarakatnya. Dan sistem *Hukou* tersebut masih berjalan efektif hingga sekarang (Bahl and Jorge, 2003).

2.1.7 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Daerah

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu kondisi terjadinya perkembangan GNP potensial yang mencerminkan adanya pertambahan output perkapita dan meningkatnya standar hidup masyarakat. Menurut Kuznets dalam Todaro (2006) pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari suatu negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, institusional dan ideologis terhadap berbagai keadaan yang ada.

Pembangunan daerah pada hakekatnya merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya ekonominya secara berdaya guna dan berhasil guna demi kesejahteraan masyarakatnya (Yunisti, 2012). Untuk itu diperlukan pertumbuhan ekonomi yang tinggi agar kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Pertumbuhan ekonomi ini tidak berdiri sendiri, melainkan harus diimbangi dengan fungsi distribusi yang melahirkan pemerataan. Namun sayangnya dalam berbagai realita yang ada, pertumbuhan dan pemerataan tidak selalu jalan beriringan. Walaupun pada beberapa kasus, pertumbuhan ekonomi suatu daerah diikuti dengan pemerataan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut. Namun sebagian besar khususnya di Indonesia, meningkatnya pertumbuhan ekonomi tidak menjadi jaminan bahwa akan terjadi pemerataan.

Penekanan pertumbuhan ekonomi wilayah lebih dipusatkan pada pengaruh perbedaan karakteristik *space* terhadap pertumbuhan ekonomi. Faktor yang menjadi perhatian utama dalam teori pertumbuhan ekonomi wilayah adalah keuntungan lokasi, aglomerasi migrasi, dan arus lalu lintas modal antar wilayah. Sedangkan faktor-faktor dalam teori pertumbuhan ekonomi nasional dapat dibagi menjadi tiga macam yaitu modal, lapangan kerja, dan kemajuan teknologi. Kemampuan daerah untuk tumbuh sangat ditentukan oleh berbagai faktor ekonomi yang satu sama lain sering kali mempengaruhi.

Bermula dari teori perubahan struktur ekonomi, menurut Fisher dan Kindleberger dalam Djojohadikusumo pertumbuhan ekonomi biasanya disertai dengan pergeseran permintaan barang dari sektor primer ke sektor sekunder. Pendapat ini kemudian didukung oleh Clark dengan penelitian menggunakan data cross sectional beberapa negara. Clark menyusun struktur kesempatan kerja produksi dan tingkat pendapatan nasional perkapita. Hasilnya adalah semakin tinggi tingkat pendapatan nasional perkapita suatu negara, makin kecil peranan sektor primer dalam menyediakan kesempatan kerja (Djojohadikusumo, 1994).

Sejalan dengan Clark, penelitian yang dilakukan oleh Chenery dan Taylor (1975) dalam Ristiardani (2011), memperlihatkan corak perubahan struktur ekonomi menggunakan data dari berbagai negara dalam kurun waktu tertentu, dalam analisisnya proses perubahan struktur ekonomi ada hubungannya dengan pendapatan perkapita dengan presentase sumbangan berbagai sektor ekonomi pada produksi nasional (Sukirno, 1995).

Chenery dalam penjelasannya mengungkapkan salah satu faktor terjadinya penyebab pergeseran sektor primer ke sektor sekunder dan berimbas pada terjadinya perbedaan pendapatan perkapita antara daerah satu dengan yang

lain adalah dikarenakan adanya *comparative advantage* yang dimiliki tiap negara atau daerah berbeda-beda. Negara atau daerah yang memiliki keunggulan dalam sektor primer akan memproduksi barang primer dan mengimpor barang sekunder, begitupun sebaliknya. Kemudian dengan sifat alami manusia yang apabila terjadi peningkatan pendapatan maka proporsi pembelian barang primer akan menurun dan proporsi pembelian barang sekunder akan meningkat, hal ini mengakibatkan perbedaan pendapatan perkapita antar daerah yang semakin meningkat (Harun dan Ghozali, 2012). Kesimpulannya berdasarkan uraian tersebut adalah bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pembangunan wilayah.

2.2 Studi Empiris

Penelitian-penelitian mengenai ketimpangan daerah masih terus dilakukan baik yang berupa pengujian hipotesis maupun pengembangan teori lebih lanjut. Berikut ini adalah peneliti-peneliti yang telah melakukan penelitian mengenai ketimpangan daerah antara lain:

Chrisyanto, Carlos (2006) menulis tentang “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Antar Daerah di Indonesia” dengan menggunakan analisis Indeks Williamson dan regresi berganda dengan menggunakan data pendapatan perkapita serta pengeluaran daerah yang digunakan untuk pembangunan selama masa sebelum dan sesudah krisis ekonomi. Data yang digunakan adalah data 30 provinsi tahun 1989-2003. Hasil analisis menunjukkan bahwa terjadi ketimpangan antar daerah di Pulau Jawa yang disebabkan tingginya pendapatan perkapita DKI Jakarta sementara daerah di luar Pulau Jawa disebabkan oleh tingginya pendapatan perkapita di Kalimantan Timur. Dari hasil

regresi menunjukkan bahwa ketimpangan daerah dengan faktor migas dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah pada saat 2 tahun sebelum dan pada saat terjadi krisis, sementara dengan faktor nonmigas dipengaruhi oleh pendapatan perkapita daerah dan pengeluaran pemerintah. Peningkatan alokasi pengeluaran pemda khusus untuk daerah miskin atau yang tidak kaya dengan migas akan memperkecil ketimpangan karena pengeluaran pemerintah sebagian besar dialokasikan kepada daerah kaya (DKI Jakarta) dan daerah yang kaya migas yaitu Kalimantan Timur dan Riau.

Yunisti, Trias Dewi (2012) menulis tentang “Analisis Ketimpangan Pembangunan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Banten” menilik sumber daya manusia sebagai kunci utama dan sebagai modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan di Provinsi Banten. Dengan menggunakan Indeks Williamson dan Indeks Theil dalam menghitung besaran tingkat pendapatan, pendidikan, serta kesehatan yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia dalam memainkan peran sebagai aktor pembangunan ekonomi.

Azzumar, Mochammad Rizky (2011) menulis tentang “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Investasi Swasta, Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Era Desentralisasi Fiskal tahun 2005-2009 (Studi Kasus Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah)”. Penelitian dilakukan dengan tujuan mengetahui seberapa besar pengaruh variabel pendapatan asli daerah, dana perimbangan, investasi swasta, tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2005-2009. Jenis data penelitian adalah data panel dengan menggunakan data sekunder berdasarkan urutan waktu (*time series*) dan berdasarkan urutan observasi (*cross section*). Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan program *evIEWS 6*. Metode

yang digunakan dalam penelitian adalah OLS (*Ordinary Least Square*) dengan pendekatan *fixed effect* atau LSDV (*Least Square Dummy Variable*). Dari hasil penelitian, diketahui ada pengaruh yang positif antara pendapatan asli daerah, dana perimbangan, investasi swasta dan tenaga kerja. Akan tetapi dana perimbangan dan investasi swasta tidak berpengaruh signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Berbeda halnya dengan pendapatan asli daerah dan tenaga kerja yang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

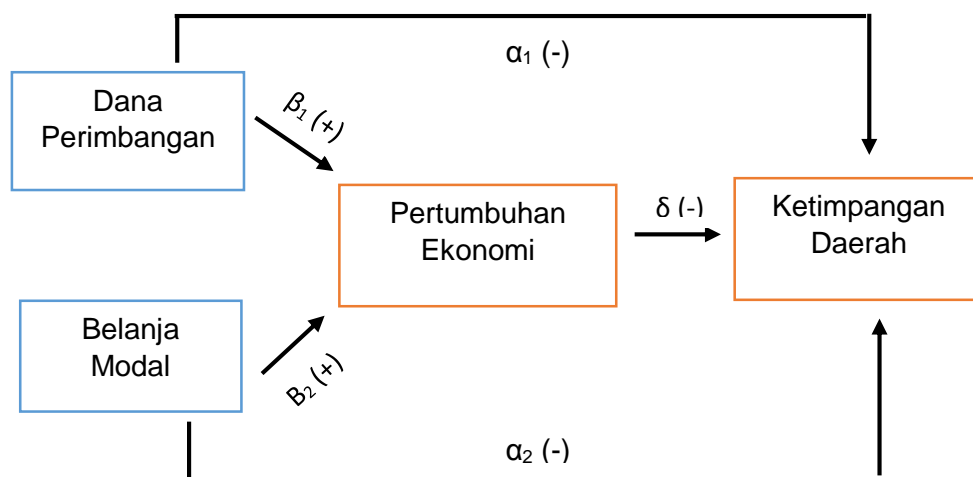
Anasmen (2009), menulis tentang “Pengaruh Belanja Modal Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Barat periode 2000-2006”. Penelitian membahas hubungan antara belanja modal pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi dengan tujuan melihat pengaruh besarnya belanja modal pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, investasi swasta dan jumlah penduduk terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat (2000-2006). Penelitian ini menggunakan metode regresi berganda dan data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal pemerintah tidak signifikan mempengaruhi pertumbuhan PDRB. Investasi swasta signifikan mempengaruhi PDRB. Jumlah penduduk juga signifikan mempengaruhi PDRB.

2.3 Kerangka Konseptual

Penelitian ini akan menganalisis faktor-faktor ketimpangan daerah. Faktor-faktor yang akan diteliti yaitu faktor dana perimbangan, faktor belanja modal, dan faktor pertumbuhan ekonomi.

Masalah ketimpangan merupakan permasalahan yang banyak dihadapi negara sedang berkembang seperti Indonesia, tidak terkecuali ketimpangan daerah yang terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan.

Pembangunan ekonomi suatu wilayah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pendistribusian yang merata di setiap daerahnya. Salah satu cara meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pertumbuhan ekonomi ditunjukkan dengan meningkatkan PDRB khususnya PDRB perkapita pada suatu wilayah. Harapan pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan dapat meningkatkan pendapatan perkapita dan mensejahterakan masyarakat secara merata.



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

Dana perimbangan merupakan sumber pembiayaan berbagai kegiatan Pemerintah Daerah untuk dapat tumbuh dan berkembang di era desentralisasi. Dana perimbangan yang terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang

berasal dari APBN untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Belanja modal adalah salah satu komponen belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kebutuhan investasi yang dapat menambah aset tetap dan lainnya serta manfaatnya lebih dari satu periode akuntansi.

2.4 Hipotesis

Berdasarkan teori dan kerangka konseptual yang telah dijabarkan sebelumnya, maka hipotesa yang dimunculkan adalah sebagai berikut:

1. Diduga dana perimbangan secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan periode 2009-2013.
2. Diduga dana perimbangan secara tidak langsung berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan daerah melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan periode 2009-2013.
3. Diduga belanja modal secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan periode 2009-2013.
4. Diduga belanja modal secara tidak langsung berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan daerah melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan periode 2009-2013.
5. Diduga pertumbuhan ekonomi secara langsung berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan periode 2009-2013.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini bertempat di lingkup Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat kuantitatif yaitu data yang diperoleh dari BPS Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan, serta kantor/instansi yang berhubungan dengan penyediaan data penelitian dalam bentuk angka-angka dan masih perlu di analisis kembali. Data meliputi data *time series* dan data *cross section* atau *Panel (Pooled) Data* dari tahun 2009-2013 tentang dana perimbangan, belanja modal, pertumbuhan ekonomi, dan ketimpangan daerah yang dihitung dengan Indeks Williamson.

3.3 Metode Analisis

Untuk mengetahui pengaruh dana perimbangan, belanja modal, dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan, digunakan metode regresi berganda.

Metode regresi berganda adalah metode regresi yang melibatkan satu variabel respon dengan beberapa variabel bebas. Sedangkan pengolahan data-data dari persamaan regresi dapat diketahui dengan metode *Ordinary Least Square* (metode kuadrat kecil). Metode ini bertujuan untuk menguji hipotesis tentang adanya hubungan sebab akibat antara berbagai variabel yang diteliti

berdasarkan data-data yang diperoleh guna mendapatkan makna dan implikasi permasalahan yang ingin dipecahkan secara sistematis, aktual dan akurat (Wagiono, 1994).

Studi ini menggunakan analisis panel data sebagai alat pengolahan data dengan menggunakan program Eviews 8. Analisis dengan menggunakan panel data adalah kombinasi antara deret waktu (*time series*) dan kerat lintang (*cross section data*). Gujarati (2003) menyatakan bahwa untuk menggambarkan data panel secara singkat, misalkan pada data *cross section*, nilai dari satu variabel atau lebih dikumpulkan untuk beberapa unit sampel pada satu waktu. Dalam data panel, unit *cross section* yang sama di survey dalam beberapa waktu. Parameter variabel independen akan diestimasi dengan menggunakan analisis data panel dengan menggabungkan data *cross section* dan *time series* (Widarjono, 2013).

3.3.1 Analisis Regresi

Berikut adalah model dasar untuk analisis empirik dengan menggunakan data panel untuk keperluan analisis dengan menggunakan model regresi linear berganda. Maka model estimasinya dituliskan sebagai berikut:

$$Y_1 = f(X_1, X_2) \quad \dots (3.1)$$

$$Y_2 = f(X_1, X_2, Y_1) \quad \dots (3.2)$$

Persamaan (3.1) dan (3.2) kemudian ditulis dalam bentuk fungsional sebagai berikut:

$$e^{Y_1} = \alpha_0 \cdot X_1^{\alpha_1} \cdot X_2^{\alpha_2} \cdot e^{\mu_1} \quad \dots (3.1.a)$$

$$Y_1 = \ln \alpha_0 + \alpha_1 \ln X_1 + \alpha_2 \ln X_2 + \mu_1 \quad \dots (3.1.b)$$

$$e^{Y_2} = \beta_0 \cdot X_1^{\beta_1} \cdot X_2^{\beta_2} \cdot e^{Y_1 \beta_3} \cdot e^{\mu_2} \quad \dots (3.2.a)$$

$$Y_2 = \ln \beta_0 + \beta_1 \ln X_1 + \beta_2 \ln X_2 + \beta_3 Y_1 + \mu_2 \quad \dots (3.2.b)$$

Substitusi persamaan (3.1.b) ke persamaan (3.2.b)

$$Y_2 = \ln \beta_0 + \beta_1 \ln X_1 + \beta_2 \ln X_2 + \beta_3 (\ln \alpha_0 + \alpha_1 \ln X_1 + \alpha_2 \ln X_2 + \mu_1) + \mu_2$$

$$Y_2 = \ln \beta_0 + \beta_1 \ln X_1 + \beta_2 \ln X_2 + \beta_3 \ln \alpha_0 + \beta_3 \alpha_1 \ln X_1 + \beta_3 \alpha_2 \ln X_2 + \beta_3 \mu_1 + \mu_2$$

$$Y_2 = (\ln \beta_0 + \beta_3 \ln \alpha_0) + (\beta_1 + \beta_3 \alpha_1) \ln X_1 + (\beta_2 + \beta_3 \alpha_2) \ln X_2 + (\beta_3 \mu_1 + \mu_2)$$

$$Y_2 = \gamma_0 + \gamma_1 \ln X_1 + \gamma_2 \ln X_2 + \mu \quad \dots (3.2.c)$$

Keterangan:

Y_1 = Pertumbuhan ekonomi dalam satuan persen

Y_2 = Ketimpangan daerah

X_1 = Dana perimbangan dalam satuan Rupiah

X_2 = Belanja modal dalam satuan Rupiah

$\alpha_0, \beta_0, \gamma_0$ = Konstanta

$\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi

μ = $\beta_3 \mu_1 + \mu_2$

γ_0 = $\ln \beta_0 + \beta_3 \ln \alpha_0$

γ_1 = $\beta_1 + \beta_3 \alpha_1$

γ_2 = $\beta_2 + \beta_3 \alpha_2$

3.3.2 Indeks Williamson

Indeks Williamson (V_w) menganalisis seberapa besar kesenjangan antar wilayah/daerah. Dasar perhitungannya adalah dengan menggunakan PDRB perkapita dalam kaitannya dengan jumlah penduduk per daerah. Kesenjangan wilayah antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan dengan menggunakan Indeks Williamson. Rumus dari Indeks Williamson adalah sebagai berikut:

$$Vw = \frac{\sqrt{\sum(Y_i - \bar{y})^2 f_i/n}}{\bar{y}} \quad \dots(3.3)$$

Keterangan:

Vw = Nilai indeks Williamson

Yi = PDRB perkapita Kabupaten/Kota ke-*i* (Rupiah)

\bar{y} = PDRB perkapita rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan (Rupiah)

f_i = Jumlah penduduk Kabupaten/Kota ke-*i* (jiwa)

n = Jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Selatan (jiwa)

Pengertian indeks ini adalah $0 < Vw < 1$, yaitu bila Vw mendekati 1 berarti sangat timpang, dan bila Vw mendekati 0 (nol) berarti sangat merata (ketimpangan yang terjadi kecil). Menurut Sutarno (2003) Indeks Williamson hanya menjelaskan distribusi PDRB perkapita antar kabupaten di 1 provinsi tanpa menjelaskan seberapa besar PDRB perkapita yang didistribusikan tersebut dengan PDRB perkapita rata-rata daerah lain.

3.4 Pengujian Kriteria Statistik

Gujarati (2003) menyatakan bahwa uji signifikansi merupakan prosedur yang digunakan untuk menguji kebenaran atau kesalahan dari hasil hipotesis nol dari sampel. Ide dasar yang melatarbelakangi pengujian signifikansi adalah uji statistik (estimator) dari distribusi sampel dari suatu statistik dibawah hipotesis nol. Keputusan untuk mengolah H_0 dibuat berdasarkan nilai uji statistik yang diperoleh dari data yang ada. Uji statistik dari pengujian koefisien regresi parsial (uji t), pengujian koefisien regresi secara bersama-sama (uji F), dan pengujian koefisien determinasi *Goodness of fit test* (R^2) (Widarjono, 2013).

3.4.1 Pengujian Signifikansi Stimultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara keseluruhan signifikan secara statistik dalam mempengaruhi variabel dependen. Apabila nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel maka variabel-variabel independen secara keseluruhan berpengaruh terhadap variabel dependen. Hipotesis yang digunakan adalah:

$$H_0 = \beta_1 = \beta_2 = \beta_n = 0$$

H_1 : minimal ada satu koefisien regres tidak sama dengan nol

(Gujarati, 2003)

Nilai F hitung dirumuskan sebagai berikut:

$$F = \frac{R^2/(K-1)}{(1-R^2)/(N-K)} \quad \dots (3.4)$$

Dimana:

K = Jumlah parameter yang diestimasi termasuk konstanta

N = Jumlah observasi

Pada tingkat signifikansi 5% dengan kriteria pengujian yang digunakan sebagai berikut:

1. H_0 diterima dan H_1 ditolak apabila $F \text{ hitung} < F \text{ tabel}$, yang artinya variabel penjelas secara serentak atau bersama-sama tidak mempengaruhi variabel yang dijelaskan secara signifikan.
2. H_0 ditolak dan H_1 diterima apabila $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$, yang artinya variabel penjelas secara serentak dan bersama-sama mempengaruhi variabel yang dijelaskan secara signifikan.

3.4.2 Pengujian Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen secara sendiri-sendiri mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Dengan kata lain, untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen dapat menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel dependen secara nyata.

Untuk mengkaji pengaruh variabel independen terhadap dependen secara individu dapat dilihat pada hipotesis berikut: $H_0: \beta_1=0$ tidak berpengaruh. $H_1: \beta_1>0$ berpengaruh positif, $H_1: \beta_1<0$ berpengaruh negatif. Dimana β_1 adalah koefisien variabel independen ke-1 yaitu nilai parameter hipotesis. Biasanya nilai β dianggap nol, artinya tidak ada pengaruh variabel X_1 terhadap Y . bila t statistik $> t$ tabel maka H_0 diterima (signifikan) dan jika t statistik $< t$ tabel maka H_0 ditolak (tidak signifikan). Uji t digunakan untuk membuat keputusan apakah hipotesis terbukti atau tidak, dimana tingkat signifikan yang digunakan yaitu 5%.

3.4.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Imam Ghazali (2005) menyatakan bahwa koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan suatu model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai R^2 adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil atau mendekati nol berarti kemampuan satu variabel dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Kelemahan mendasar penggunaan determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model. Setiap tambahan satu variabel pasti meningkat, tidak peduli apakah

variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai *adjusted* pada saat mengevaluasi model regresi yang terbaik.

3.5 Definisi Operasional

Batasan variabel dari penelitian ini antara lain:

1. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana perimbangan ini terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dalam penelitian ini, dana perimbangan dihitung dari segi pertumbuhannya pada tingkat Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan tahun 2009-2013 dan diukur dalam satuan persen.
2. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Dalam penelitian ini, belanja modal dihitung dari segi pertumbuhannya pada tingkat Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan tahun 2009-2013 dan diukur dalam satuan persen.
3. Pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Dalam penelitian ini, perubahan tingkat ekonomi yang dicapai oleh Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan, parameter yang diukur yaitu dari perubahan persentase PDRB harga konstan tahun 2000, periode 2009-2013 dan diukur dalam satuan persen.
4. Ketimpangan Daerah adalah ketidakmerataan pembangunan pada tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang diukur dengan Indeks

Williamson periode 2009-2013. Indeks Williamson dihitung berdasarkan PDRB perkapita dan jumlah penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Kondisi Geografis

Letak geografis Provinsi Sulawesi Selatan adalah di antara 0°12' - 8° LS dan 116°48' - 122°36' BT. Batas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan adalah bagian utara berbatasan dengan Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat, di bagian timur berbatasan dengan Teluk Bone dan Sulawesi Tenggara, sedangkan di bagian barat berbatasan dengan Selat Makassar dan bagian selatan berbatasan dengan Laut Flores.

Luas wilayah Sulawesi Selatan mencapai 45.764,53 km² yang terbagi menjadi 21 kabupaten dan 3 kotamadya dan terdiri atas 304 kecamatan dan 2.953 desa/kelurahan.

4.1.2 Kondisi Demografis

Sulawesi Selatan memainkan peran penting dan strategis bagi perkembangan wilayah Pulau Sulawesi dan Kawasan Timur Indonesia. Sulawesi Selatan secara geografis terletak pada titik tengah wilayah Indonesia yang menempatkannya sebagai pintu gerbang bagi daerah Sulawesi lainnya bahkan untuk daerah Kawasan Timur Indonesia melalui perhubungan laut (pelabuhan Soekarno Hatta), darat (titik awal trans Sulawesi) dan udara (Bandar udara Sultan Hasanuddin). Dimasa lalu, Makassar merupakan pelabuhan internasional baik sebelum maupun pada jaman penjajahan. Dengan demikian, dari rentang waktu masa lalu hingga masa kini, posisi sebagai pintu gerbang Sulawesi dan Kawasan

Timur Indonesia, bahkan posisi sebagai *centre point of Indonesia* melekat pada Provinsi Sulawesi Selatan. Posisi strategis ini membuat Sulawesi Selatan menjadi pusat produksi dan distribusi barang serta jasa ke wilayah Indonesia Timur lainnya, sejalan pula dengan visi Sulawesi Selatan yaitu “*Sulawesi Selatan sebagai pilar utama pembangunan nasional dan simpul jejaring akselerasi kesejahteraan*”. Dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) menetapkan Sulawesi Selatan sebagai sentra distribusi di Kawasan Timur Indonesia yang berfokus pada pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, migas dan pertambangan nasional. Dengan demikian, semakin terlihat jelas bahwa Provinsi Sulawesi Selatan adalah salah satu provinsi dengan letak geografis yang sangat strategis dan sangat menguntungkan terutama dalam bidang perekonomian namun juga memiliki peran yang sangat penting di skala nasional.

Luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 45.784,53 km² pada pencatatan tahun 2012 dan kemudian bertambah luas menjadi 46.083,94 km² menurut data BPS Provinsi Selatan dalam publikasi “*Sulawesi Selatan dalam Angka 2014*”. Kabupaten Luwu Utara memiliki wilayah paling luas yaitu 7.365,71 km². Sedangkan daerah dengan luas wilayah terkecil adalah Kota Pare-pare dengan luas 88,92 km².

Dari sisi demografi, total jumlah penduduk pada tahun 2009 berjumlah 7.908.519 jiwa dan kemudian semakin meningkat setiap tahunnya hingga berjumlah 8.342.047 jiwa pada tahun 2013. Populasi tertinggi sejak tahun 2009 hingga tahun 2013 adalah Kota Makassar dengan jumlah penduduk 1.408.072 jiwa dan mendominasi persentase populasi di Provinsi Sulawesi Selatan dalam lima tahun terakhir yaitu sekitar 16% dari total populasi.

Tabel 4.1
Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut
Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 dan Tahun 2013

No.	Kabupaten/Kota	Luas Daerah		Jumlah Penduduk (Jiwa)		Kepadatan per Km ²	
		2009	2013	2009	2013	2009	2013
1	Bantaeng	395,83	397,06	174.176	181.006	440	456
2	Barru	1174,71	1192,39	162.985	169.302	139	142
3	Bone	4559	4593,38	711.748	734.119	156	160
4	Bulukumba	1154,67	1170,10	394.746	404.896	342	346
5	Enrekang	1786,01	1821,41	190.576	196.394	107	108
6	Gowa	1883,32	1802,08	617.317	696.096	328	386
7	Jeneponto	903,35	837,99	334.175	351.111	370	419
8	Luwu	3000,25	2940,51	328.180	343.793	109	117
9	Luwu Utara	7502,68	7365,51	229.090	222.393	43	40
10	Maros	1619,12	1538,44	306.687	331.796	189	216
11	Pangkep	1112,29	814,95	298.701	317.110	269	389
12	Pinrang	1961,17	1892,42	351.042	361.293	179	191
13	Kep. Selayar	903,5	1199,91	121.749	127.220	135	106
14	Sidrap	1883,25	2081,01	252.483	283.307	134	136
15	Sinjai	819,96	924,15	228.304	234.886	278	254
16	Soppeng	1359,44	1337,99	230.744	225.512	170	169
17	Takalar	566,51	620,26	257.974	280.590	455	452
18	Tana Toraja	2054,30	2149,67	240.249	226.212	117	105
19	Wajo	2506,20	2394,15	381.066	390.603	152	163
20	Pare-pare	99,33	88,92	118.842	135.192	1.196	1.520
21	Makassar	175,77	181,35	1.271.870	1.408.072	7.236	7.764
22	Palopo	247,52	254,57	146.482	160.819	592	632
23	Luwu Timur	6944,88	7315,77	237.354	263.012	34	36
24	Toraja Utara	1151,47	1169,95	229.090	222.393	199	190

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 dan 2014

Tabel 4.1 menunjukkan data perbandingan populasi dan tingkat kepadatan di masing-masing Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2009 dan tahun 2013. Daerah dengan jumlah populasi terendah adalah Kabupaten

Kepulauan Selayar dengan jumlah penduduk sebanyak 121.749 jiwa pada tahun 2009 dan meningkat menjadi 127.220 pada tahun 2013. Kepadatan penduduk Provinsi Sulawesi Selatan yaitu 181 jiwa/km² pada tahun 2013 yang cenderung terpusat di ibukota provinsi. Daerah dengan kepadatan penduduk tertinggi adalah Kota Makassar sebesar 7764 jiwa/km² pada tahun 2013 dan 7236 jiwa/km² pada tahun 2009. Kabupaten Luwu Utara sebagai wilayah yang memiliki wilayah terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan hanya memiliki tingkat kepadatan penduduk hanya sebesar 40 orang/km² pada tahun 2013 dan sebanyak 42.92 orang/km² pada tahun 2009. Tingkat kepadatan penduduk terendah berada di Kabupaten Luwu Timur sebesar 36 orang/km² pada tahun 2013 dan sebanyak 34,18 orang/km² pada tahun 2009.

Tingkat populasi suatu provinsi juga mempengaruhi besarnya dana perimbangan yang akan diterima dari pemerintah pusat. Dengan tingkat populasi yang semakin meningkat sejak lima tahun terakhir, maka diharapkan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tidak luput dalam memberikan perhatiannya di bidang kesejahteraan masyarakat, khususnya jumlah penduduk miskin yang tersebar di provinsi ini. Keberhasilan pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan dapat berdampak pada berkurangnya tingkat kemiskinan di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Data tingkat kemiskinan periode 2009 hingga tahun 2013 dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Menurut BPS Provinsi Sulawesi Selatan, tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan mencerminkan angka yang cenderung baik. Pada tahun 2009 terdapat sekitar 12,31 persen dari total penduduk yang ada merupakan penduduk miskin. Sedangkan pada tahun 2013 menurun menjadi 9,54 persen. Selama periode tahun 2009 hingga tahun 2013 jika diperhatikan baik dari sisi persentase

maupun absolut, kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan mengalami penurunan.

Garis kemiskinan pada tahun 2009 hingga tahun 2013 masing-masing adalah Rp 153.715, Rp 163.089, Rp 179.933, Rp 190.545 dan Rp 2013.070.

Tabel 4.2
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota
di Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013

No	Kabupaten /Kota	2009		2010		2011		2012		2013	
		Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%
1	Bantaeng	17.211	9,96	18.116	10,24	16.484	9,21	15.900	8,89	18.900	10,45
2	Barru	18.476	11,43	17.716	10,68	16.120	9,59	15.500	9,28	17.500	10,32
3	Bone	107.271	15,19	100.990	14,08	92.075	12,67	88.800	12,25	87.700	11,92
4	Bulukumba	41.122	10,50	35.594	9,02	32.422	8,12	31.300	7,82	36.700	9,04
5	Enrekang	34.239	18,10	32.023	16,84	29.235	15,18	28.200	14,44	29.700	15,11
6	Gowa	67.013	10,93	61.882	9,49	56.557	8,55	54.600	8,05	61.000	8,73
7	Jeneponto	68.219	20,58	65.322	19,09	59.562	17,16	57.500	16,58	58.100	16,52
8	Luwu	55.227	16,96	51.363	15,43	46.903	13,93	45.200	13,33	52.000	15,10
9	Luwu Utara	52.455	16,40	46.708	16,24	42.622	14,64	41.100	14,02	46.200	15,52
10	Maros	49.777	16,35	46.522	14,62	42.440	13,14	40.900	12,55	43.100	12,94
11	Pangkep	57.367	19,35	58.872	19,26	53.733	17,36	51.800	16,62	56.400	17,75
12	Pinrang	30.320	8,70	31.631	9,01	28.870	8,12	27.900	7,82	32.100	8,86
13	Kep. Selayar	19.834	16,41	18.261	14,98	16.666	13,49	16.100	12,87	18.200	14,23
14	Sidrap	16.857	6,73	19.001	6,99	17.304	6,29	16.700	6,00	17.900	6,30
15	Sinjai	25.766	11,37	24.444	10,68	22.313	9,63	21.500	9,28	24.300	10,32
16	Soppeng	22.784	9,95	23.298	10,41	21.220	9,36	20.400	9,12	21.300	9,43
17	Takalar	28.325	11,06	30.026	11,16	27.413	10,04	26.400	9,59	29.300	10,42
18	Tana Toraja	75.240	16,14	32.409	14,61	29.599	13,22	28.600	12,72	31.300	13,81
19	Wajo	33.770	8,93	34.473	8,96	31.420	8,06	30.300	7,83	31.900	8,17
20	Pare-pare	7.685	6,52	8.455	6,53	7.741	5,91	7.400	5,58	8.600	6,38
21	Makassar	69.667	5,52	78.467	5,86	71.675	5,29	69.200	5,02	66.400	4,70
22	Palopo	17.260	11,85	16.702	11,28	15.300	10,22	14.800	9,46	15.500	9,57
23	Luwu Timur	21.013	8,91	22.296	9,18	20.401	8,29	19.700	7,71	22.200	8,38
24	Toraja Utara			41.087	19,08	37.431	17,06	36.100	16,27	36.800	16,53

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010-2014

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun. Pada Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa dalam setiap tahunnya pemerintah provinsi berhasil menurunkan angka kemiskinan yang kemudian pada tahun 2013 kembali meningkat walaupun peningkatannya hanya sekitar 0,50 persen dari tahun sebelumnya. Kabupaten Bone adalah daerah yang memiliki angka penduduk miskin tertinggi sejak tahun 2009 hingga tahun 2013 masing-masing sebesar 107.271 jiwa dan 87.700 jiwa.

Walaupun sudah dapat mengurangi jumlah penduduk miskinnya dalam kurung waktu tersebut, namun tetap saja secara absolut Kabupaten Bone menduduki posisi pertama. Kemudian Kota Pare-pare adalah daerah yang memiliki jumlah penduduk miskin terendah sejak tahun 2009 hingga tahun 2013 yaitu masing-masing sebanyak 7.685 jiwa dan 8.600 jiwa. Walaupun sebagai daerah yang memiliki penduduk miskin terendah di Sulawesi Selatan, namun Kota Pare-pare tidak mampu mengurangi jumlah penduduk miskinnya dari tahun 2012 yang berjumlah sebesar 7.400 jiwa.

Secara persentase, data pada Tabel 4.2 menunjukkan bahwa Kabupaten Jeneponto merupakan daerah yang memiliki tingkat persentase jumlah penduduk miskin tertinggi pada tahun 2009 yaitu sebesar 20,6 persen yang kemudian setiap tahunnya semakin menurun hingga 16,5 persen pada tahun 2013. Kota Makassar adalah daerah yang memiliki tingkat persentase penduduk miskin terendah di Sulawesi Selatan yaitu 5,52 persen pada tahun 2009 dan terus menurun setiap tahunnya hingga 4,7 persen di tahun 2013. Tren positif yang terlihat dari data pada Tabel 4.2 menunjukkan bahwa dana perimbangan memiliki pengaruh positif dalam mengurangi angka kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan.

4.1.3 Indikator Ekonomi Makro Daerah

Indikator ekonomi makro daerah untuk penelitian ini meliputi PDRB Provinsi Sulawesi Selatan atas dasar harga berlaku, PDRB perkapita atas dasar harga berlaku dan jumlah tenaga kerja yang terserap selama periode 2009-2013.

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator ekonomi makro daerah di Provinsi Sulawesi Selatan adalah PDRB yang dalam hal ini dihitung berdasarkan harga berlaku. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu pencerminan kemajuan

ekonomi suatu daerah yang didefinisikan sebagai keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasil dalam waktu satu tahun di wilayah tersebut. Selama periode 2009-2013 nilai PDRB atas dasar harga berlaku di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada Tabel 4.3 yang memberikan informasi mengenai besaran Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sulawesi Selatan yang tersebar di 24 Kabupaten/Kota dan Kota Makassar masih menjadi pemasok terbesar dalam PDRB Sulawesi Selatan.

Tabel 4.3
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Belaku
Menurut Kabupaten/Kota (Juta Rupiah) Provinsi Sulawesi Selatan
2009-2013

No	Kabupaten/Kota	2009	2010	2011	2012	2013
1	Bantaeng	1.532.910,58	1.831.773,14	2.180.708,61	2.536.709,90	2.950.882,41
2	Barru	1.440.923,92	1.665.901,72	1.904.306,68	2.189.892,65	2.503.113,80
3	Bone	6.412.649,40	7.530.369,81	8.835.528,87	10.372.888,63	11.788.865,91
4	Bulukumba	3.255.210,15	3.763.053,25	4.286.358,33	5.044.765,06	5.830.501,33
5	Enrekang	1.614.215,19	1.921.392,87	2.291.755,53	2.680.809,01	3.316.559,41
6	Gowa	4.309.671,23	5.082.230,41	5.931.369,84	6.791.070,31	7.832.780,08
7	Jeneponto	1.872.776,87	2.273.511,88	2.676.015,41	3.095.249,98	3.551.624,63
8	Luwu	3.195.646,47	3.717.632,93	4.351.150,40	5.030.495,95	5.784.726,16
9	Luwu Utara	2.678.044,35	3.068.339,43	3.570.912,84	4.155.740,10	4.851.431,13
10	Maros	2.153.006,96	2.598.067,30	3.039.190,92	3.495.957,22	4.018.383,57
11	Pangkep	4.597.936,04	5.379.302,84	6.413.121,20	7.676.581,32	8.898.027,98
12	Pinrang	4.492.956,91	5.290.607,32	6.216.631,34	7.237.528,74	8.261.557,75
13	Kep. Selayar	917.280,09	1.131.776,13	1.386.060,85	1.709.076,56	2.015.889,46
14	Sidrap	2.944.140,55	3.366.701,75	4.215.957,04	4.932.509,64	5.462.352,81
15	Sinjai	2.395.566,65	2.813.762,88	3.235.344,23	3.716.149,62	4.284.745,80
16	Soppeng	2.316.917,25	2.728.359,73	3.209.370,07	3.690.683,88	4.254.982,77
17	Takalar	1.837.602,23	2.055.096,87	2.386.106,51	2.749.769,82	3.130.961,46
18	Tana Toraja	1.259.215,83	1.471.969,78	1.794.453,29	2.190.123,46	2.568.003,03
19	Wajo	4.664.693,50	5.409.457,65	6.655.973,93	7.736.092,89	8.941.540,52
20	Pare-pare	1.519.156,10	1.795.963,76	2.073.555,92	2.376.530,24	2.771.804,96
21	Makassar	31.263.651,66	37.007.451,92	43.428.149,82	50.702.400,56	58.802.552,51
22	Palopo	1.646.987,34	1.946.847,77	2.284.801,89	2.637.545,42	3.081.642,00
23	Luwu Timur	6.416.034,42	8.294.255,58	9.670.171,43	10.446.649,61	12.789.845,56
24	Toraja Utara	1.263.745,18	1.499.236,90	1.821.421,55	2.204.393,74	2.611.378,06
	Sulawesi Selatan	99.954.589,75	117.862.210,18	137.519.771,93	159.859.931,38	184.783.059,05

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan (diolah) Tahun 2010-2014

Sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Selatan, pada tahun 2013, sebesar 32,66 persen perekonomian Sulawesi Selatan terpusat di jantung ibukota Sulawesi Selatan. Data menunjukkan bahwa seluruh Kabupaten/Kota di Sulawesi

Selatan sejak tahun 2009 hingga tahun 2013 menunjukkan tren positif. Terlihat bahwa PDRB yang diterima masing-masing Kabupaten/Kota semakin meningkat setiap tahunnya.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Kota Makassar adalah penyumbang terbesar dalam PDRB Provinsi Sulawesi Selatan yang dihitung atas dasar harga berlaku, terlihat pada Tabel 4.3 pada tahun 2009 Kota Makassar jauh mengungguli PDRB Kabupaten/Kota lainnya dan berhasil mendapatkan sebesar Rp 31.263.651,66 dan semakin meningkat setiap tahunnya hingga mencapai Rp 58.802.552,51 pada tahun 2013. Daerah yang mendapatkan nilai PDRB atas dasar harga berlaku periode 2009-2013 terendah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar yang hanya mendapatkan sebesar Rp 917.280,09 pada tahun 2009 dan Rp 2.015.889,46 pada tahun 2013. Namun demikian, Kabupaten Kepulauan Selayar terus menunjukkan peningkatan dengan tren positif setiap tahunnya.

Secara agregat, Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2009 hingga tahun 2013 tetap menunjukkan peningkatan yang konsisten selama kurung waktu tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa masing-masing pemerintah daerah di setiap Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan telah mengolah sumber daya dan seluruh potensi yang dimiliki dengan efisien. Hal ini juga akan berpengaruh pada kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh para pemerintah daerah masing-masing Kabupate/Kota Provinsi Sulawesi Selatan.

2. PDRB Perkapita

Selain Produk Domestik Regional Bruto, adapula indikator lain yang dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah yaitu nilai PDRB perkapita. Secara konsepsional, PDRB perkapita merupakan

hasil bagi antara nilai nominal PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Maka, PDRB perkapita hanya merupakan nilai rata-rata pendapatan dari total PDRB dan tidak menggambarkan rata-rata pendapatan masyarakat secara riil. Perkembangan PDRB perkapita Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat lebih jelas pada Tabel 4.4. Secara umum, tingkat PDRB perkapita di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan tren yang cukup baik, dengan angka yang terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat sebagai salah satu indikator bahwa masyarakat pada umumnya di Provinsi Sulawesi Selatan semakin sejahtera walaupun PDRB perkapita belum mengcover seluruhnya dalam hal penentuan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Pada analisis indikator ekonomi makro daerah sebelumnya, yaitu PDRB Provinsi Sulawesi Selatan atas dasar harga berlaku, disebutkan bahwa Kota Makassar merupakan penyumbang terbesar terhadap PDRB Sulawesi Selatan. Walaupun dengan jumlah pendapatan daerah yang sangat tinggi, tidak mencerminkan pendapatan perkapita yang di Kota Makassar juga tinggi. Pendapatan perkapita tertinggi sejak tahun 2009 hingga tahun 2013 adalah Kabupaten Luwu Timur. Kondisi demografis Kabupaten Luwu Timur yang memiliki luas lahan terluas kedua di Sulawesi Selatan dan kepadatan penduduk terendah di Sulawesi Selatan, semakin memberikan kesempatan terhadap Kabupaten Luwu Timur untuk mendapatkan nilai pendapatan perkapita yang sangat tinggi.

Kabupaten Jeneponto adalah daerah yang menduduki posisi terendah untuk pendapatan perkapita sejak tahun 2009 hingga tahun 2013 walaupun setiap tahunnya terus menunjukkan progresif yang cukup baik. Dengan adanya data PDRB perkapita ini, setidaknya sudah ada gambaran bahwa terjadi peningkatan

kemampuan ekonomi pada masyarakat Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan selama kurung waktu 2009-2013.

Tabel 4.4
PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2009-2013 (Rupiah)

No.	Kabupaten/Kota	2009	2010	2011	2012	2013
1	Bantaeng	8.728.416	10.331.548	12.210.288	14.307.525	16.302.677
2	Barru	8.723.197	10.004.214	11.368.249	13.150.929	14.784.904
3	Bone	8.985.077	10.458.861	12.188.231	14.406.810	16.058.522
4	Bulukumba	8.304.680	9.507.702	10.742.753	12.746.065	14.399.997
5	Enrekang	8.557.801	10.063.706	11.885.343	14.041.310	16.887.478
6	Gowa	6.723.419	7.759.391	8.867.681	10.368.395	11.252.442
7	Jeneponto	5.498.174	6.612.737	7.727.270	9.002.845	10.115.390
8	Luwu	9.698.354	11.147.425	12.911.847	15.084.082	16.826.189
9	Luwu Utara	9.399.879	10.639.512	12.253.745	14.410.089	16.317.588
10	Maros	6.822.748	8.116.348	9.337.411	10.921.351	12.111.007
11	Pangkep	15.187.789	17.538.326	20.668.286	25.028.222	28.059.752
12	Pinrang	12.891.200	15.022.239	17.496.261	20.550.361	22.866.642
13	Kep. Selayar	7.600.677	9.248.275	11.168.543	13.965.668	15.845.696
14	Sidrap	10.949.482	12.340.920	15.257.130	18.080.517	19.916.037
15	Sinjai	10.535.799	12.255.972	13.980.098	16.186.519	18.241.810
16	Soppeng	10.360.170	12.148.883	14.276.303	16.433.935	18.868.099
17	Takalar	6.890.922	7.597.653	8.646.164	10.165.846	11.158.493
18	Tana Toraja	5.728.578	6.635.995	8.036.821	9.873.605	11.352.196
19	Wajo	12.148.525	14.002.386	17.162.755	20.024.883	22.891.633
20	Pare-pare	11.900.669	13.848.983	15.766.808	18.325.830	20.502.729
21	Makassar	23.690.417	27.559.380	31.816.543	37.757.982	41.761.041
22	Palopo	11.409.601	13.119.362	14.975.139	17.773.816	19.162.176
23	Luwu Timur	27.013.744	34.019.481	38.646.213	42.925.608	48.628.373
24	Toraja Utara	5.868.904	6.892.948	8.313.805	10.135.004	11.742.177

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan (diolah) Tahun 2010-2014

Hal yang berbeda dengan Kota Makassar, walaupun PDRB yang dicapai cukup tinggi setiap tahunnya, namun kepadatan penduduk di Kota Makassar merupakan yang terpadat di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal itulah yang membuat nilai PDRB perkapita di Kota Makassar lebih rendah.

3. Ketenagakerjaan

Indikator ekonomi makro daerah yang terakhir adalah ketenagakerjaan yang merupakan penduduk usia kerja yaitu berumur 15 tahun keatas. Dalam penelitian ini hanya akan melihat seberapa besar tenaga kerja yang terserap di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan yang tentunya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan. Data tenaga kerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.5 yang memberikan informasi seberapa banyak tenaga kerja yang terserap di setiap Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan mulai tahun 2011 hingga tahun 2013.

Kota Makassar sebagai ibukota provinsi sudah sewajarnya jika mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak dibanding dengan Kabupaten/Kota lainnya dan tentu saja dengan daya penyerapan tenaga kerja lebih besar pula. Terbukti pada data didalam Tabel 4.5 bahwa Kota Makassar memiliki jumlah tenaga kerja tertinggi selama tahun 2011 dan 2012 masing-masing sebesar 541.050 jiwa dan 502.308 jiwa. Walaupun menjadi daerah yang memiliki tenaga kerja tertinggi, namun terjadi penurunan tingkat tenaga kerja yang terserap dalam periode satu tahun tersebut.

Daerah yang menyerap tenaga kerja paling rendah adalah Kota Pare-pare selama tahun 2011 dan 2012 masing-masing hanya sebesar 50.829 jiwa dan 51.819 jiwa. Pada tahun 2013, Kabupaten Kepulauan Selayar menyerap tenaga kerja paling rendah yaitu hanya sebesar 50.501 jiwa sekaligus menunjukkan penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan Kota Pare-pare juga mengalami penurunan yang tidak terlalu signifikan pada tahun 2013 menjadi 51.070 jiwa.

Tabel 4.5
Tenga Kerja Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2011-2013

No.	Kabupaten/Kota	Total Tenaga Kerja (Jiwa)		
		2011	2012	2013
1	Bantaeng	76.823	84.827	80.732
2	Barru	70.288	63.983	59.707
3	Bone	308.168	322.088	310.636
4	Bulukumba	169.567	188.255	167.698
5	Enrekang	76.608	90.720	86.740
6	Gowa	277.060	273.211	297.347
7	Jeneponto	148.183	156.601	145.480
8	Luwu	134.791	118.667	120.563
9	Luwu Utara	120.961	121.584	114.593
10	Maros	133.867	134.344	129.866
11	Pangkep	129.103	113.656	110.517
12	Pinrang	146.453	126.724	123.973
13	Kep. Selayar	52.226	52.064	50.501
14	Sidrap	118.720	104.710	96.076
15	Sinjai	95.654	112.493	110.349
16	Soppeng	100.335	97.953	88.267
17	Takalar	116.802	113.782	109.992
18	Tana Toraja	89.224	105.929	98.426
19	Wajo	174.317	168.455	159.958
20	Pare-pare	50.829	51.819	51.070
21	Makassar	541.050	502.308	
22	Palopo	58.139	55.973	58.437
23	Luwu Timur	103.754	101.769	104.930
24	Toraja Utara	82.566	89.993	87.657

Sumber: Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan

Penyerapan tenaga kerja mempunyai hubungan yang kuat dengan jumlah penduduk miskin yang tersebar di Provinsi Sulawesi Selatan. Semakin banyak tenaga kerja yang terserap di suatu daerah, maka seharusnya jumlah penduduk

miskin di daerah tersebut juga berkurang, kemudian untuk jangka panjangnya, hal ini dapat mempengaruhi total PDRB masing-masing daerah.

4.2 Perkembangan Variabel Penelitian

4.2.1 Perkembangan Dana Perimbangan di Provinsi Sulawesi Selatan

Tahun 2009-2013

Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah-daerah untuk membiayai kebutuhan daerah tersebut. Dana perimbangan meliputi Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil.

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan ke daerah-daerah dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum bersifat block grant yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Tujuan pemberian DAK adalah untuk mengurangi *inter-jurisdictional spillovers* dan meningkatkan penyediaan barang publik di daerah. Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah

bersasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Tabel 4.6
Realisasi Dana Perimbangan (Juta Rupiah) di Provinsi Sulawesi Selatan
Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009-2013

No	Kabupaten/Kota	2009	2010	2011	2012	2013
1	Bantaeng	298.633	313.528	351.500	392.630	469.886
2	Barru	328.248	324.653	365.694	428.158	485.125
3	Bone	655.569	663.026	761.562	913.646	1.028.563
4	Bulukumba	471.417	467.675	526.846	605.029	687.582
5	Enrekang	339.739	330.935	376.761	459.138	515.435
6	Gowa	523.428	531.613	558.349	681.320	759.719
7	Jeneponto	376.439	392.108	443.071	528.943	596.878
8	Luwu	422.560	446.226	480.929	556.600	618.704
9	Luwu Utara	407.846	421.923	471.662	537.612	599.201
10	Maros	402.125	433.360	440.525	541.143	624.605
11	Pangkep	421.972	457.942	479.276	570.276	670.681
12	Pinrang	421.922	446.104	503.085	578.559	672.727
13	Kep. Selayar	332.458	320.940	375.598	436.944	523.437
14	Sidrap	398.026	394.589	455.665	514.053	574.947
15	Sinjai	366.706	359.822	423.508	481.981	547.281
16	Soppeng	401.072	397.522	448.093	513.337	599.643
17	Takalar	370.474	374.856	402.024	482.168	554.717
18	Tana Toraja	344.452	370.358	409.072	477.283	524.464
19	Wajo	482.114	483.861	549.331	707.011	818.069
20	Pare-pare	309.582	318.683	332.672	411.474	465.309
21	Makassar	833.834	861.280	905.873	1.105.464	1.152.042
22	Palopo	310.077	323.692	347.878	421.382	818.069
23	Luwu Timur	350.609	332.249	426.007	488.536	527.292
24	Toraja Utara	156.006	361.126	372.009	420.230	509.380

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (diolah)

Tabel 4.6 menunjukkan perkembangan dana perimbangan di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2009-2013, dimana selama

kurung waktu tersebut dana perimbangan di masing-masing Kabupaten/Kota menunjukkan tren yang terus meningkat setiap tahunnya. Meskipun demikian, pada tahun 2009 daerah yang mendapatkan *transfer grant* atau dana perimbangan terendah adalah Kabupaten Toraja Utara sebesar Rp 156.005.628.725 kemudian pada tahun 2010 dan 2012 Kabupaten Bantaeng menjadi daerah yang menduduki posisi terendah yang mendapatkan dana masing-masing sebesar Rp 313.528.000.000 dan Rp 392.630.000.000 walaupun tetap menunjukkan peningkatan positif dari tahun sebelumnya. Hal yang sama terjadi pada Kota Parepare yang mendapatkan total dana perimbangan terendah di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2011 dan 2013 masing-masing sebesar Rp 332.672.000.000 dan Rp 465.309.192.690.

Berbeda dengan Kabupaten Toraja Utara, Bantaeng dan Kota Parepare yang mendapatkan posisi dana perimbangan terendah pada masing-masing tahunnya, Kota Makassar dalam kurung waktu 2009-2013 menjadi satu-satunya daerah yang selalu mendapatkan dana perimbangan tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan. Peningkatan yang cukup signifikan juga terjadi di Kabupaten Bone pada tahun 2013 yang mendapatkan dana perimbangan sebesar Rp 1.028.563.164.914 dari tahun sebelumnya sebesar Rp 913.646.000.000.

4.2.2 Perkembangan Belanja Modal di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013

Belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah. Belanja daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah diantaranya pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, transportasi,

sehingga masyarakat juga menikmati manfaat dari pembangunan daerah. Tersedianya infrastruktur yang baik diharapkan menjadi semakin tinggi dan pada gilirannya terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi. Belanja modal yang merupakan salah satu komponen dari belanja langsung merupakan pengeluaran pemerintah yang sifatnya langsung menyentuh pada peningkatan kualitas layanan publik sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan belanja modal di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2009 hingga tahun 2013 ditunjukkan pada Tabel 4.7.

Rasio belanja modal terhadap total belanja yang dikeluarkan oleh suatu daerah mencerminkan porsi belanja daerah yang dibelanjakan untuk belanja modal. Belanja modal sendiri jika ditambah dengan belanja barang dan jasa, merupakan belanja pemerintah yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah selain dari sektor swasta, rumah tangga, dan luar negeri. Oleh karena itu, semakin tinggi angka rasionya maka semakin baik pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam lima tahun terakhir, total belanja modal di masing-masing Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan angka yang sangat bervariasi.

Tabel 4.7 menunjukkan data total belanja modal yang sangat fluktuatif setiap tahunnya di masing-masing Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan sejak tahun 2009 hingga tahun 2013. Berdasarkan tabel 4.7 tersebut, menunjukkan bahwa seluruh Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan tidak ada yang memiliki data total belanja modal yang terus meningkat tiap tahunnya dalam kurung waktu tahun 2009-2013. Tabel 4.7 ini memberikan data tiga daerah dengan rata-rata belanja modal terendah tahun 2009 hingga tahun 2013 adalah Kabupaten Takalar, Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Toraja Utara masing-masing

sebesar Rp 81.110.758.373,40; Rp 102.057.541.905,60 dan Rp 105.114.323.122,80. Sedangkan tiga daerah yang memiliki rata-rata belanja modal tertinggi tahun 2009 hingga tahun 2013 adalah Kabupaten Luwu Timur, Kota Makassar dan Kabupaten Wajo masing-masing sebesar Rp 260.921.825.138,36; Rp 250.762.736.013 dan Rp 204.117.017.085,80.

Tabel 4.7
Realisasi Belanja Modal (Juta Rupiah) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2009-2013

No	Kabupaten/Kota	2009	2010	2011	2012	2013
1	Bantaeng	98.153	81.634	108.863	76.193	145.444
2	Barru	220.853	99.539	157.856	107.619	122.547
3	Bone	204.070	89.002	132.148	194.151	254.432
4	Bulukumba	120.856	99.858	139.172	100.510	147.498
5	Enrekang	188.830	100.345	101.766	92.860	103.530
6	Gowa	215.696	182.529	141.260	146.109	312.270
7	Jeneponto	94.445	107.587	137.513	97.159	142.306
8	Luwu	108.500	1.099.540	161.545	109.453	158.234
9	Luwu Utara	94.670	77.102	145.055	1.229.680	140.476
10	Maros	121.392	47.490	125.213	131.299	280.252
11	Pangkep	187.130	135.097	150.395	160.017	208.220
12	Pinrang	150.415	127.183	177.216	141.710	144.059
13	Kep. Selayar	150.428	68.819	79.220	85.078	190.690
14	Sidrap	158.888	110.302	127.721	80.113	161.388
15	Sinjai	155.799	109.488	119.061	88.941	114.676
16	Soppeng	132.711	77.303	111.147	78.924	137.068
17	Takalar	94.682	93.469	108.410	98.101	10.892
18	Tana Toraja	91.857	68.881	166.152	153.048	146.990
19	Wajo	190.450	151.246	207.352	215.353	256.184
20	Pare-pare	104.149	133.780	122.710	79.295	133.344
21	Makassar	197.717	176.732	168.524	318.618	392.222
22	Palopo	134.783	74.542	115.120	97.877	256.184
23	Luwu Timur	419.034	167.867	167.535	228.946	321.228
24	Toraja Utara	12.911	97.898	98.598	141.889	174.275

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (diolah)

Namun, Kabupaten Barru mengalami penurunan total belanja modal yang cukup drastis pada tahun 2010 menjadi Rp 99.539 dari tahun sebelumnya sebesar Rp 220.853. Sedangkan fenomena yang sangat bertolak belakang terjadi di

Kabupaten Luwu yang mengalami peningkatan total belanja modal yang cukup tajam pada tahun 2010 sebesar Rp 1.099.540 yang pada tahun sebelumnya hanya berkisar Rp 108.500.

4.2.3 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2014

Salah satu indikator dalam kemajuan pembangunan suatu daerah atau negara dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini dengan fokus di Provinsi Sulawesi Selatan maka dapat ditilik dari besarnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dicapai oleh masing-masing Kabupaten/Kota dan dibandingkan dengan nilai PDRB tahun sebelumnya. Nilai PDRB adalah keseluruhan nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam waktu satu tahun di wilayah tersebut.

Secara umum, pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan sebagai kenaikan PDRB atau PDB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk. Data pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan ditunjukkan pada Tabel 4.8. Berdasarkan data yang telah diolah, menunjukkan tiga daerah yang memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi terendah selama periode 2009 hingga tahun 2013 adalah Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Enrekang masing-masing sebesar 3,86%, 6,51% dan 6,53%. Ketiga daerah tersebut menunjukkan data yang fluktuatif setiap tahunnya namun Kabupaten Luwu Timur memberikan data pertumbuhan yang sangat signifikan pada tahun 2010 dengan persentase pertumbuhan ekonomi

sebesar 115,29% dari tahun sebelumnya sebesar -4,04% dan kembali bergerak positif kembali pada tahun 2013 dengan persentase pertumbuhan ekonomi sebesar 9,62%.

Selain itu, beberapa daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi dalam periode tersebut di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Kota Makassar, Kabupaten Kepulauan Selayar dan Kabupaten Bantaeng masing-masing sebesar 9,49%, 8,61%, dan 8,25%. Ketiga daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi ini selalu menunjukkan peningkatan dan tren positif tiap tahunnya.

Tabel 4.8
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi (%) Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2009-2013

No	Kabupaten/Kota	2009	2010	2011	2012	2013
1	Bantaeng	7,61	7,90	8,43	8,49	8,82
2	Barru	5,72	6,54	7,41	7,77	7,81
3	Bone	7,51	7,63	6,20	8,01	6,09
4	Bulukumba	6,47	6,27	6,38	8,97	8,01
5	Enrekang	6,62	4,99	6,91	7,18	6,96
6	Gowa	7,99	6,05	6,20	7,28	7,78
7	Jeneponto	5,38	7,25	7,32	7,27	6,97
8	Luwu	6,82	6,95	7,47	7,49	7,78
9	Luwu Utara	6,68	5,93	7,29	8,03	8,17
10	Maros	6,27	7,03	7,57	8,00	8,67
11	Pangkep	5,91	6,34	9,17	9,61	7,93
12	Pinrang	7,65	6,22	7,12	8,27	6,81
13	Kep. Selayar	7,89	8,01	8,52	9,18	9,47
14	Sidrap	6,66	4,45	11,82	8,37	7,44
15	Sinjai	7,02	6,03	5,90	6,33	7,29
16	Soppeng	6,81	4,45	7,95	7,48	7,57
17	Takalar	6,58	6,85	7,34	7,40	7,33
18	Tana Toraja	6,10	6,31	7,88	8,02	7,57
19	Wajo	5,10	5,71	10,93	8,71	8,01
20	Pare-pare	8,09	8,25	7,80	7,92	8,47
21	Makassar	9,20	9,83	9,65	9,88	8,91
22	Palopo	7,86	7,29	8,16	8,68	8,99
23	Luwu Timur	-4,04	15,39	-6,62	4,97	9,62
24	Toraja Utara	5,74	7,00	7,90	8,47	8,51

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010-2014

Pada tahun 2010, Kabupaten Luwu Timur mengalami peningkatan yang sangat tajam pada persentase pertumbuhan ekonomi yaitu sebesar 15,29 persen yang sebelumnya -4,04 persen. Kabupaten Sidrap pada tahun 2011 menjadi daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu sebesar 11,82 persen.

4.2.4 Perkembangan Ketimpangan Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan

Tahun 2009-2013

Ketimpangan pembangunan yang terjadi di setiap daerah merupakan suatu hal penting yang harus di perhatikan untuk mencegah dan mengurangi masalah-masalah yang terjadi karena adanya ketidakmerataan antar wilayah. Setiap daerah dituntut untuk mampu mengelola potensi daerah yang mereka miliki secara tepat agar dapat mendorong terciptanya proses pembangunan dengan tingkat pemerataan yang baik disertai dengan tingkat pertumbuhan yang baik pula.

Indeks Williamson merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengukur ketimpangan suatu wilayah. Hasil dari perhitungan indeks Williamson akan menunjukkan seberapa timpang daerah tersebut dengan indeks angka antara nol sampai dengan satu. Variabel-variabel yang digunakan untuk menghitung indeks Williamson adalah PDRB Kabupaten/Kota yang diformulasikan dengan jumlah penduduk. Jika hasil perhitungan indeks Williamson semakin mendekati angka satu maka ketimpangan yang terjadi juga semakin besar dan sebaliknya jika angka mendekati nol maka ketimpangan yang terjadi di daerah tersebut semakin rendah. Data hasil perhitungan indeks Williamson untuk Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2009 hingga tahun 2013 dapat dilihat pada Tabel 4.9.

Berdasarkan teori Neo Klasik, ketimpangan pembangunan wilayah terjadi karena adanya perbedaan sumberdaya, tenaga kerja, dan modal yang dimiliki oleh tiap daerah berbeda-beda. Menurut teori ini, ketimpangan akan berkurang dengan sendirinya karena pada tahap awal pembangunan yang dilaksanakan oleh negara berkembang, kesempatan dan peluang pembangunan pada umumnya dimanfaatkan oleh daerah-daerah yang kondisi pembangunannya lebih baik. Sedangkan daerah-daerah yang masih sangat terbelakang tidak mampu memanfaatkan peluang karena keterbatasan sarana dan prasarana serta rendahnya kualitas sumber daya manusia (Harun dan Ghozali, 2012).

Tabel 4.9
Perkembangan Indeks Williamson Menurut Kabupaten/Kota Provinsi
Sulawesi Selatan, Tahun 2009-2013

No	Kabupaten/Kota	2009	2010	2011	2012	2013
1	Bantaeng	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
2	Barro	0,01	0,03	0,03	0,03	0,03
3	Bone	0,02	0,05	0,05	0,04	0,05
4	Bulukumba	0,03	0,05	0,06	0,05	0,05
5	Enrekang	0,02	0,03	0,03	0,03	0,02
6	Gowa	0,08	0,11	0,11	0,11	0,12
7	Jeneponto	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10
8	Luwu	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02
9	Luwu Utara	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02
10	Maros	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07
11	Pangkep	0,12	0,08	0,09	0,09	0,09
12	Pinrang	0,07	0,05	0,05	0,05	0,04
13	Kep. Selayar	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02
14	Sidrap	0,03	0,00	0,01	0,01	0,01
15	Sinjai	0,02	0,00	0,01	0,01	0,01
16	Soppeng	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Takalar	0,05	0,07	0,07	0,07	0,08
18	Tana Toraja	0,07	0,08	0,07	0,07	0,07
19	Wajo	0,06	0,03	0,04	0,04	0,04
20	Pare-pare	0,03	0,02	0,01	0,01	0,01
21	Makassar	0,60	0,50	0,50	0,51	0,49
22	Palopo	0,03	0,01	0,01	0,01	0,00
23	Luwu Timur	0,12	0,31	0,29	0,27	0,28
24	Toraja Utara	0,07	0,07	0,07	0,07	0,06

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan (diolah) Tahun 2009-2014

Berdasarkan data yang tersedia pada Tabel 4.9 ketimpangan yang paling besar selama periode 2009-2013 di Provinsi Sulawesi Selatan terjadi di Kota Makassar dengan tingkat rata-rata ketimpangan sebesar 0,50 dan rata-rata ketimpangan terendah di Kabupaten Soppeng dengan tingkat ketimpangan sebesar 0,00.

4.3 Hasil Analisis Ekonometrika

4.3.1 Pengujian Statistik Model Y_1

Dari hasil regresi model Y_1 (lihat Lampiran 8.3) pengaruh variabel dana perimbangan (X_1) dan belanja modal (X_2) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y_1) diperoleh dengan nilai R^2 sebesar 0,69. Hal ini berarti variabel-variabel independen yaitu dana perimbangan (X_1) dan belanja modal (X_2) menjelaskan variasi pertumbuhan ekonomi (Y_1) di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 69%. Adapun sisanya variasi variabel yang lain dijelaskan diluar model sebesar 31%.

Pengujian terhadap pengaruh semua variabel independen didalam model dapat dilakukan dengan uji F. Pengaruh dana perimbangan (X_1) dan belanja modal (X_2) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y_1) di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan dengan menggunakan taraf keyakinan 95% ($\alpha = 0,05$), dari regresi pada Lampiran 8.3 diperoleh probabilitas F statistik sebesar 0,00. Jadi, dapat disimpulkan bahwa variabel bebas berpengaruh nyata terhadap variabel dependen.

Uji signifikansi individu (Uji t) bermaksud untuk melihat signifikansi pengaruh variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Parameter yang digunakan adalah suatu variabel dependen bila nilai t statistik >

nilai t tabel atau juga dapat diketahui dari nilai probabilitas t statistik yang lebih kecil dari α (α) 1%, 5 % atau 10%. Pengaruh dana perimbangan (X_1) dan belanja modal (X_2) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y_1) di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan dengan menggunakan taraf keyakinan 95% dan degree of freedom (23, 94) diperoleh t tabel sebesar 1,985. Dari Lampiran 8.3, dapat diketahui nilai t statistik variabel bebas dana perimbangan (X_1) sebesar 4,29 dan t statistik belanja modal (X_2) sebesar 2,28. Kedua hasil regresi tersebut memperlihatkan bahwa t statistik $>$ t tabel sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua variabel bebas tersebut secara individu signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (Y_1).

4.3.2 Pengujian Statistik Model Y_2

Dari hasil regresi model Y_2 (lihat lampiran 9.3) pengaruh variabel dana perimbangan (X_1), belanja modal (X_2) dan pertumbuhan ekonomi (Y_1) terhadap ketimpangan daerah (Y_2) diperoleh dengan nilai R^2 sebesar 0,12. Hal ini berarti variabel-variabel independen yaitu dana perimbangan (X_1), belanja modal (X_2) dan pertumbuhan ekonomi (Y_1) menjelaskan variasi ketimpangan daerah (Y_2) di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 12%. Adapun sisanya variasi variabel yang lain dijelaskan diluar model sebesar 88%.

Pengujian terhadap pengaruh semua variabel independen didalam model dapat dilakukan dengan uji F. Pengaruh dana perimbangan (X_1), belanja modal (X_2) dan pertumbuhan ekonomi (Y_1) terhadap ketimpangan daerah (Y_2) di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan dengan menggunakan taraf keyakinan 95% ($\alpha = 0,05$), dari regresi pada Lampiran 9.3 diperoleh probabilitas F statistik

sebesar 0,00. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas berpengaruh nyata terhadap variabel dependen.

Uji signifikansi individu (Uji t) bermaksud untuk melihat signifikansi pengaruh variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Parameter yang digunakan adalah suatu variabel dependen bila nilai t statistik > nilai t tabel atau juga dapat diketahui dari nilai probabilitas t statistik yang lebih kecil dari alpha (α) 1%, 5 % atau 10%. Pengaruh dana perimbangan (X_1), belanja modal (X_2) dan pertumbuhan ekonomi (Y_1) terhadap ketimpangan daerah (Y_2) di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan dengan menggunakan taraf keyakinan 95% dan *degree of freedom* (23, 93) diperoleh t tabel sebesar -2,491. Dari Lampiran 9.3, dapat diketahui nilai t statisitik variabel bebas dana perimbangan (X_1) sebesar 0,256; t statistik belanja modal (X_2) sebesar -2,030 dan t statistik pertumbuhan ekonomi (Y_1) sebesar 3,630. Dari hasil regresi tersebut memperlihatkan bahwa t statisik > t tabel pada variabel dana perimbangan (X_1) dan pertumbuhan ekonomi (Y_1) sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua variabel bebas tersebut secara individu signifikan mempengaruhi ketimpangan daerah (Y_2). Sedangkan pada variabel belanja modal (X_2) menunjukkan bahwa t statistik < t tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel bebas tersebut secara individu tidak signifikan mempengaruhi ketimpangan daerah (Y_2).

4.4 Analisis Hasil

Hasil interpretasi data terhadap pengaruh dana perimbangan, belanja modal dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2009-2013 dapat dilihat

pada Tabel 4.10. Berdasarkan penentuan model analisis pada Lampiran 2 dan Lampiran 3 maka berikut adalah ringkasan interpretasi data pada Tabel 4.10.

Dari Tabel 4.10 menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2009 hingga tahun 2013. Hal ini terlihat pada Tabel 4.10 yang menunjukkan nilai probabilitasnya kurang dari 5% (0,05) yaitu 0,00 dan nilai koefisien X_1 menunjukkan angka 0,19 artinya setiap kenaikan dana perimbangan sebesar 1% mengakibatkan peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,19%. Sebaliknya apabila dana perimbangan turun sebesar 1% maka mengakibatkan penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,19%.

Tabel 4.10
Pengaruh Dana Perimbangan, Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi
terhadap Ketimpangan Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan
Periode 2009-2013

Variabel Bebas	Variabel Terikat	Koefisien	Probabilitas	F statistik	t statistik	R square	Pengaruh Variabel
X_1	Y_1	0,197	0,000	8,401	4,295	0,690	Positif dan signifikan
X_2	Y_1	0,020	0,024	8,401	2,281	0,690	Positif dan signifikan
X_1	Y_2	0,002	0,797	5,318	0,256	0,120	Tidak signifikan
X_2	Y_2	-0,009	0,044	5,318	-2,030	0,120	Negatif dan signifikan
Y_1	Y_2	0,003	0,000	5,318	3,630	0,120	Positif dan signifikan

Sumber: Data sekunder yang diolah dari Eviews 8.0

Hasil regresi menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2009 hingga tahun 2013. Hal ini terlihat pada Tabel 4.10 yang menunjukkan nilai

probabilitasnya kurang dari 5% (0,05) yaitu 0,02 dan nilai koefisien X_2 sebesar 0,02. Hal ini menunjukkan jika terjadi peningkatan di belanja modal sebesar 1% maka akan mengakibatkan peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,02% dan sebaliknya jika belanja modal turun sebesar 1% maka pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan sebesar 0,02%.

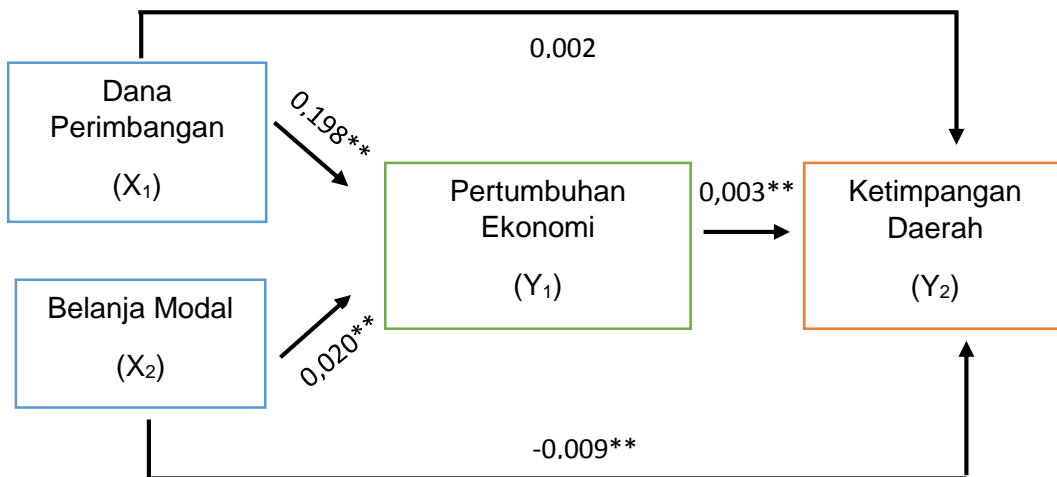
Selanjutnya, data menunjukkan bahwa dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap ketimpangan daerah melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan periode 2009-2013. Hal ini terlihat pada Tabel 4.10 yang menunjukkan nilai probabilitas lebih besar dari alpha 5% (0,05) yaitu 0,79 dan nilai koefisien X_1 sebesar 0,002. Hal ini menunjukkan jika terjadi peningkatan pada dana perimbangan sebesar 1% maka akan mengakibatkan peningkatan ketimpangan daerah sebesar 0,002% dan sebaliknya jika dana perimbangan turun sebesar 1% maka ketimpangan daerah juga akan mengalami penurunan sebesar 0,002%.

Belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan daerah melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2009-2013. Hal ini dapat terlihat pada Tabel 4.10 yang menunjukkan nilai probabilitas kurang dari 5% (0,05) yaitu sebesar 0,04. Selain itu, nilai koefisien X_2 sebesar -0,009 yang memiliki arti bahwa jika terjadi peningkatan pada belanja modal sebesar 1% maka akan menurunkan tingkat ketimpangan daerah sebesar 0,009% dan sebaliknya jika belanja modal turun sebesar 1% maka akan meningkatkan ketimpangan daerah sebesar 0,009%.

Dari hasil regresi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2009-2013. Hal ini terlihat pada Tabel 4.10 yang menunjukkan nilai

0,00 pada tingkat probabilitas yang kurang dari alpha 5%. Nilai koefisien yang menunjukkan angka sebesar 0,003 memberikan arti bahwa jika terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 1% maka akan mengakibatkan peningkatan ketimpangan daerah sebesar 0,003% dan sebaliknya jika pertumbuhan ekonomi turun sebesar 1% maka akan mengakibatkan turunnya ketimpangan daerah sebesar 0,003%.

Hasil dari interpretasi data tersebut jika dikembalikan pada kerangka konseptual, maka akan terlihat seperti pada Gambar 4.1.



Gambar 4.1
Kerangka Konseptual dengan Hasil Estimasi

Keterangan Gambar:

** : Signifikan pada $\alpha = 5\%$

Gambar 4.1 memberikan informasi mengenai koefisien yang di peroleh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dari hasil regresi yang telah dilakukan (lihat Lampiran). Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi, seluruh variabel bebas berpengaruh positif terhadap ketimpangan daerah kecuali variabel belanja modal.

4.5 Pembahasan

4.5.1 Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Ketimpangan Daerah

Dalam penelitian ini dana perimbangan dipresentasikan oleh total Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil dari seluruh 24 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan selama tahun 2009-2013. Sedangkan ketimpangan daerah dihitung berdasarkan formula Indeks Williamson yang meliputi PDRB, PDRB perkapita dan jumlah penduduk di setiap Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan dalam kurung waktu tersebut.

Hasil perhitungan secara langsung menunjukkan bahwa dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap ketimpangan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2009-2013. Jika realisasi dana perimbangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan setiap tahunnya maka hal ini tidak akan berdampak terhadap ketimpangan yang akan terjadi pada masing-masing daerah. Namun perlu diingat kembali, walaupun hal ini terjadi dan tidak mempengaruhi ketimpangan daerah namun sangat mengindikasikan tingkat ketergantungan pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Selatan terhadap pemerintah pusat. Jika ingin mandiri, tidak masalah jika dana perimbangan dikurangi karena hal ini tidak mempengaruhi tingkat ketimpangan yang terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan.

Pada dasarnya, dana perimbangan merupakan transfer yang dilakukan oleh pemerintah pusat ke seluruh daerah-daerah di Indonesia sejak diberlakukannya sistem otonomi daerah dengan tujuan mengurangi ketimpangan keuangan yang terjadi baik ketimpangan fiskal daerah dengan pemerintah pusat dan juga mengurangi ketimpangan fiskal yang terjadi antar-pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini menolak hipotesis yang tersedia dan tidak sejalan dengan kebanyakan studi empiris, salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Ristriardani (2011) tentang pengaruh dana perimbangan terhadap pendapatan perkapita dan disparitas antar daerah menghasilkan konklusi bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan daerah. Dalam penelitian ini, hasil regresi yang mengungkapkan bahwa tidak adanya signifikansi antara dana perimbangan terhadap ketimpangan daerah sudah sejalan dengan maksud dan tujuan dari adanya dana perimbangan itu sendiri. Hal ini juga didukung dengan teori yang diungkapkan oleh Oates (1972) bahwa dengan adanya desentralisasi fiskal maka dapat meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya yang dapat memuaskan kebutuhan warga suatu daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dana perimbangan tidak dapat dijadikan sebagai suatu instrumen dalam hal mengukur ketimpangan yang terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan. Pada dasarnya, tidak ada teori yang melandasi hubungan antara dana perimbangan dan ketimpangan daerah secara langsung. Salah satu fungsi dari dana perimbangan adalah untuk mengurangi tingkat ketimpangan fiskal baik secara vertikal maupun horizontal antara pemerintah pusat dan daerah serta antar pemerintah daerah. Disisi lain, jika melihat komposisi dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil tersebut memberikan informasi bahwa rata-rata total realisasi dana perimbangan terbesar terdapat pada Dana Alokasi Umum yang dimana dipergunakan lebih banyak untuk membayar gaji pegawai. Jadi, faktor yang menyebabkan ketimpangan daerah tidak dapat diukur dari besarnya realisasi dana perimbangan melainkan ditentukan oleh variabel-variabel lainnya di luar model penelitian ini. Tingkat investasi asing ataupun dari dalam negeri bisa menjadi salah

satu variabel yang dapat mempengaruhi tingkat ketimpangan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan.

Secara tidak langsung, dana perimbangan berpengaruh positif terhadap ketimpangan daerah melalui pertumbuhan ekonomi. Maksud dari pengaruh positif ini adalah mengindikasikan ada hubungan kuat antara dana perimbangan dan pertumbuhan ekonomi. Jika realisasi dana perimbangan meningkat maka pertumbuhan ekonomi akan ikut meningkat pula. Begitupun sebaliknya, pertumbuhan ekonomi akan menurun di Provinsi Sulawesi Selatan jika realisasi dana perimbangan menurun. Kehadiran dana perimbangan sebagai salah satu komponen pendapatan dalam APBD khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan terbukti dari hasil pengolahan data, dapat meningkatkan nilai PDRB di setiap Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan tiap tahunnya. Fungsi dana perimbangan yang bertujuan untuk mengurangi tingkat ketimpangan antar daerah dapat dinilai dari pertumbuhan ekonomi masing-masing Kabupaten/Kota.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Pusporini dalam Iskandar (2012) yang menunjukkan bahwa dana perimbangan secara signifikan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara teori, hal ini didukung oleh teori Tiebout yang berpendapat bahwa kondisi dimana adanya peningkatan pelayanan barang publik dalam kaitannya dengan hubungan antar daerah otonomi akan meningkatkan persaingan antar Kabupaten/Kota untuk memaksimalkan kepuasan bagi masyarakatnya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka diharapkan seluruh daerah khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan dapat berlomba-lomba untuk meningkatkan efisiensi sumber daya yang dimiliki masing-masing daerah untuk mensejahterahkan

rakyatnya dan agar perkembangan dan pertumbuhan daerahnya tidak tertinggal jauh oleh daerah lain.

4.5.2 Pengaruh Belanja Modal terhadap Ketimpangan Daerah

Temuan penelitian dari hasil estimasi menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh negatif terhadap ketimpangan daerah secara langsung. Tujuan dilakukannya belanja modal oleh pemerintah adalah untuk menambah aset pemerintah baik itu aset tetap maupun aset lainnya. Dengan dilakukannya belanja modal diharapkan agar investasi pemerintah daerah setempat dapat meningkat. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa jika pemerintah daerah melakukan belanja modal, maka akan menurunkan tingkat ketimpangan di daerahnya. Artinya, semakin besar realisasi belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan akan mengurangi tingkat ketimpangan yang terjadi antar daerah di Provinsi Sulawesi Selatan. Sebaliknya, jika realisasi belanja modal menurun maka hal ini cenderung akan meningkatkan tingkat disparitas yang terjadi antar daerah. Hal ini bisa saja terjadi karena adanya peningkatan infrastruktur dan perbaikan infrastruktur yang dapat dinikmati oleh masyarakat dan tentu saja dapat berdampak pada perekonomian daerah tersebut.

Hal ini sejalan dengan hipotesis yang tersedia dan didukung oleh pendapat dari Sjafrizal (2008) yang mengatakan bahwa dalam mengatasi masalah ketimpangan wilayah dapat dilakukan dengan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, pembangunan pusat-pusat pertumbuhan yang baru di daerah berskala kecil, dan kebijakan fiskal wilayah yang mendukung penyelesaian masalah ketimpangan. Selain itu, teori Peacock dan Wiseman memberi

pandangan bahwa pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaran namun masyarakat tidak senang membayar pajak yang terus meningkat. Perbedaan belanja modal yang direalisasikan oleh masing-masing pemerintah daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan akan menimbulkan ketimpangan antar daerah.

Secara tidak langsung, hubungan belanja modal berpengaruh positif terhadap ketimpangan daerah melalui pertumbuhan ekonomi. Hal ini sejalan dengan hipotesis yang telah disediakan. Jika realisasi belanja modal meningkat maka akan mempengaruhi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan begitupun sebaliknya. Tingkat persentase pertumbuhan ekonomi akan menurun di Provinsi Sulawesi Selatan jika pemerintah daerah di masing-masing Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan mengurangi total belanja modal yang di realisasikan.

Hasil penelitian ini didukung pula oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ismail dan Hamzah (2006) yang menunjukkan hasil bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan pada 26 provinsi di Indonesia periode 1992-2002. Semakin besar pengeluaran pemerintah, dalam hal ini adalah belanja modal, maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonominya yang dihitung dari APBD masing-masing daerah. Selain dari studi empiris tersebut, secara teori hubungan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi ini didukung oleh teori Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang kemudian dibedakan menjadi tahap awal, menengah dan lanjut.

Adapun hubungan langsung antara pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan daerah, dalam penelitian ini berhubungan yang positif. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hipotesis yang tersedia. Dapat diinterpretasikan bahwa jika pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan meningkat maka hal ini dapat mendorong peningkatan ketimpangan yang terjadi antar daerah di Provinsi Sulawesi Selatan. Namun, jika pertumbuhan ekonomi menurun maka ketimpangan antar daerah juga ikut menurun. Hal ini mungkin saja terjadi karena pertumbuhan ekonomi yang dihitung dari kenaikan PDRB setiap tahunnya tidak memperhatikan masalah-masalah sosial dan demografi lainnya.

Sejalan dengan pendapat Arsyad (1999) yang berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi dapat juga diartikan sebagai kenaikan GDP atau GNP tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Jadi, tidak selamanya jika PDRB suatu daerah mengalami peningkatan dengan tren positif dan membanggakan setiap tahunnya dapat mengurangi atau menambah tingkat ketimpangan yang terjadi. Menurut Myrdal (1957) dalam penelitiannya, menyebutkan bahwa perbedaan tingkat kemajuan ekonomi antar daerah yang berlebihan akan menyebabkan pengaruh yang merugikan (*backwash effect*) dan mendominasi pengaruh yang menguntungkan (*spread effect*) terhadap pertumbuhan daerah, dalam hal ini akan mengakibatkan ketidakseimbangan. Hal ini kembali dikuatkan oleh pernyataan Sjafrizal (2008), faktor-faktor penyebab terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah (1) Perbedaan kandungan sumber daya alam; (2) Perbedaan kondisi demografis; (3) Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa; (4) Konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah; dan (5) Alokasi dana pembangunan antar wilayah.

Berdasarkan uraian tersebut, maka diharapkan pemerintah daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan khususnya, dapat lebih mengefisiensikan lagi pengeluaran belanja modal. Perlu diingat bahwa pengeluaran pemerintah dapat mencerminkan kebijakan pemerintah yang diambil. Dalam kasus hubungan antara belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan periode 2009-2013 saling berkaitan erat, maka setiap peningkatan belanja modal maka pertumbuhan ekonomi ikut meningkat dan ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, hal ini akan menjadi bumerang bagi Provinsi Sulawesi Selatan. Secara teori, khususnya di negara berkembang, sangat sulit diwujudkan bersama antara peningkatan ekonomi yang tidak diikuti dengan peningkatan ketimpangan. Namun, ada faktor lain selain pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan yang dapat berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan antar daerahnya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap ketimpangan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2009 hingga tahun 2013. Dengan kata lain, jika pemerintah pusat meningkatkan ataupun menurunkan transfer dana perimbangan ke Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan, tidak akan mempengaruhi tingkat ketimpangan daerah yang terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan. Disisi lain, hal ini terjadi karena tidak ada teori yang mendukung adanya keterkaitan antara dana perimbangan dan ketimpangan daerah. Dana perimbangan berfungsi untuk mengurangi tingkat ketimpangan fiskal daerah baik secara horizontal maupun vertikal bukan untuk mengurangi tingkat ketimpangan ekonomi yang terjadi antar daerah.
2. Dana perimbangan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya, realisasi dana perimbangan akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan pada periode 2009-2013. Peningkatan realisasi dana perimbangan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan dan penurunan realisasi dana perimbangan juga akan menurunkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan. Dana perimbangan dapat mendorong perbaikan dan penambahan infrastruktur yang lebih baik untuk masing-masing daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan yang tentu saja akan berdampak positif terhadap perekonomian

masing-masing daerah tersebut. Untuk jangka panjangnya, maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah setiap tahunnya jika dana perimbangan digunakan secara bijak dan efektif.

3. Belanja modal berpengaruh negatif terhadap ketimpangan daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa realisasi belanja modal yang terus meningkat akan menurunkan tingkat ketimpangan daerah yang terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan. Begitupun sebaliknya, jika realisasi belanja modal menurun, maka dapat meningkatkan tingkat ketimpangan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan. Belanja modal merupakan salah satu pengeluaran langsung pemerintah yang hasilnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.
4. Belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya, semakin meningkat realisasi belanja modal akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan begitupun sebaliknya jika realisasi belanja modal menurun maka tingkat pertumbuhan ekonomi akan turun. Hal ini terjadi karena salah satu syarat pembangunan ekonomi adalah tingkat pengadaaan modal pembangunan yang seimbang dengan pertambahan penduduk. Maka, bertambahnya infrastruktur dan perbaikan infrastruktur dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap ketimpangan daerah. Artinya, semakin meningkat pertumbuhan ekonomi maka akan meningkatkan ketimpangan daerah yang terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan. Namun, jika pertumbuhan ekonomi menurun, maka hal ini dapat menurunkan tingkat ketimpangan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Provinsi Sulawesi Selatan selama tahun 2009-2013 diharapkan

agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya namun cukup sulit untuk menurunkan tingkat ketimpangan yang terjadi antar daerah dan disaat bersamaan ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

5.2 Saran

Adapun saran untuk hasil penelitian ini adalah:

1. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan untuk dapat mengoptimalkan penggunaan dana perimbangan sesuai dengan koridornya masing-masing agar pengaruhnya dapat benar-benar mengurangi tingkat ketimpangan antar daerah yang terjadi dan secara tidak langsung dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di setiap daerah.
2. Dalam pengalokasian belanja modal, diharapkan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan dapat memberikan alokasi yang lebih besar untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan dimana hal tersebut sangat mendukung kegiatan perekonomian masyarakat di daerah dan antar daerah. Sehingga secara tidak langsung, dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan dapat mengurangi tingkat ketimpangan yang terjadi antar Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi setiap tahunnya di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan harus di *backup* dengan kebijakan pemerintah daerah dalam mengurangi tingkat ketimpangan yang terjadi antar daerah di Provinsi Sulawesi Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anasmen. 2009. *Pengaruh Belanja Modal Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Barat: 2000-2006*. Tesis Program Studi Perencanaan dan Kebijakan Publik. Universitas Indonesia.
- Arsyad, Lincolin. 1988. *Otonomi Pembangunan*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- _____. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah, Edisi Pertama*. Yogyakarta: BPFE.
- Azzumar, Moch. Rizky. 2011. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Investasi Swasta, Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Era Desentralisasi Fiskal tahun 2005-2009 (Studi Kasus Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah)*. Skripsi Fakultas Ekonomi. Universitas Diponegoro.
- Bahl, Roy, and Jorge Martinez-Vazquez. 2003. "International Studies Program Working Paper Series". *Fiscal Federalism and Economic Reform in China*.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2013. *Analisis Kesenjangan Antar Wilayah 2013*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Badan Pusat Statistik. 2014. *PDRB Kabupaten/Kota Tahun 2013 se-Provinsi Sulawesi Selatan*. Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. Makassar.
- _____. 2011. *Sulawesi Selatan Dalam Angka 2010*. Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. Makassar.
- _____. 2012. *Sulawesi Selatan Dalam Angka 2011*. Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. Makassar.
- _____. 2013. *Sulawesi Selatan Dalam Angka 2012*. Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. Makassar.
- _____. 2014. *Sulawesi Selatan Dalam Angka 2013*. Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. Makassar.
- _____. 2014. *Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013*. Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. Makassar.
- _____. 2013. *Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012*. Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. Makassar.
- Boediono. 1988. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE.
- Chrisyanto, Cahrlos. 2006. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan antar Daerah di Indonesia*. Jakarta: MPKP FE-UI.
- Caslos Gil Canaleta et al. 2004. *Regional Economic Disparities and Decentralisation*. 41,(1), 71-94.

- Darwanto & Yulia Yustikasari. 2007. *Pengatuh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Belanja Modal*. Simposium Nasional Akuntansi X Makassar 26-28 Juli 2007.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah. Retrived December 15, 2014, from www.djpk.depkeu.go.id.
- Dumairy. 1997. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- _____. 1999. *Matematika Terapan untuk Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE.
- Elmi, Bachrul. 2002. *Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Ghozali, Imam. 2005. *Statistik Multivarial SPSS*. Universitas Diponegoro: BP.
- Gujarati, DN. 2003. *Basic Econometrics*. New York: McGraw-Hill.
- Harun, Lukman dan Ghozali Maski. 2012. *Analisis Pengaruh Pemerintah Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah (Studi pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur)*.
- Iskandar, Maolana Amin. 2012. *Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan, dan Kemandirian Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa Periode 2006-2010)*. Skripsi Fakultas Ekonomi. Universitas Indonesia.
- Ismail, Abd. Ghafar B., & Muhammad Zilal Hamzah. Fiscal Decentralization and Economic Growth Nexus: Evidence from Province-level Cross-section Data for Indonesia. *Review of Islamic Economics* 10:2 (2006). 133-152. 18 September 2014. <www.perpustakaan.depkeu.go.id>
- Jhingan, MI. 2000. *Ekonomi Pembangunan Edisi Keenam*. Jakarta: Rajawali Press.
- _____. 2000. *Ekonomi Perencanaan & Pembangunan Edisi Pertama*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Kuncoro, Mudrajad. 1977. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP-AMP YKPN.
- _____. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Mangkoesebroto, Guritno. 1994. *Ekonomi Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: BPFE.
- _____. 2008. *Ekonomi Publik Edisi Keseblasan*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- _____. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Myrdal, Gunnar. 1976. *Bangsa-bangsa Kaya dan Miskin*. Jakarta: PT. Gramedia.

- Najlah, Laeni. 2013. *Analisis Pengaruh Pendapatan di Daerah, Dana Perimbangan dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap PDRB di Kota Depok Periode 2001-2010*. Skripsi Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Oates, Wallace. 1999. "an Essay on Fiscal Federation". *Journal of Economic Literature*. Vol.37
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar.
- Perdirjen Perbendaharaan No. PER-33/PB/2008 tentang Pedoman Penggunaan Akun Pendaatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007
- Ristriardani. 2011. *Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Pendapatan Perkapita dan Disparitas Pendapatan antar Wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan*. Tesis Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik. Universitas Indonesia.
- Sidik, Machfud. 2002. *Format Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang Mengacu pada Pencapaian Tujuan Nasional*. Jakarta
- Sjafrizal. 2008. *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. Padang: Baduose Media.
- Sumiyarti & Imamy Akhmad Fauzan. 2005. *Analisis Pengaruh Perimbangan Pusat-Daerah terhadap Perekonomian Kota Depok*. *Media Ekonomi*, 11, (2), 113-128.
- Tiebout, Charles M. 1956. *A Pure Theory of Local Expenditure*. *Journal of Political Economy*, 64, (5), 416-424.
- Todaro, Michael. 2000. *Ekonomi Pembangunan Edisi Keenam*. Jakarta: Erlangga.
- _____. 2003. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi Kedelapan*. Jakarta: Erlangga.
- _____. 2004. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Pearson Education Limited: United Kingdom.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Wagiono, Yayah K. 1994. *Metode Penelitian Sosial Ekonomi (Himpunan Makalah)*. Jakarta: Direktorat Jendral Perguruan Tinggi.
- Wandira, Arbie Gugus. 2013. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah*

- Provisi se Indonesia tahun 2012*). Skripsi Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang.
- Widarjono, Agus. 2013. *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya Edisi Keempat*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Widjaja. 2002. *Pendapatan Asli Daerah*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Yovita, Farah Marta. 2011. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi se Indonesia periode 2008-2010)*. *Diponegoro Journal of Accounting*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Yunisti, Trias Dewi. 2012. *Analisis Ketimpangan Pembangunan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Banten*. Tesis Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik. Universitas Indonesia.

LAMPIRAN

Lampiran 1

7.1 Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013 (Juta Rupiah)

Kabupaten/Kota	2009	2010	2011	2012	2013
Bantaeng	298.633	313.528	351.500	392.630	469.886
Barru	328.248	324.653	365.694	428.158	485.125
Bone	655.569	663.026	761.562	913.646	1.028.563
Bulukumba	471.417	467.675	526.846	605.029	687.582
Enrekang	339.739	330.935	376.761	459.138	515.435
Gowa	523.428	531.613	558.349	681.320	759.719
Jeneponto	376.439	392.108	443.071	528.943	596.878
Luwu	422.560	446.226	480.929	556.600	618.704
Luwu Utara	407.846	421.923	471.662	537.612	599.201
Maros	402.125	433.360	440.525	541.43	624.605
Pangkep	421.972	457.942	479.276	570.276	670.681
Pinrang	421.922	446.104	503.085	578.559	672.727
Kep. Selayar	332.458	320.940	375.598	436.944	523.437
Sidrap	398.026	394.589	455.665	514.053	574.947
Sinjai	366.706	359.822	423.508	481.981	547.281
Soppeng	401.072	397.522	448.093	513.337	599.643
Takalar	370.474	374.856	402.024	482.168	554.717
Tana Toraja	344.452	370.358	409.072	477.283	524.464
Wajo	482.114	483.861	549.331	707.011	818.069
Pare-pare	309.582	318.683	332.672	411.474	465.309
Makassar	833.834	861.280	905.873	1.105.464	1.152.042
Palopo	310.077	323.692	347.878	421.382	818.069
Luwu Timur	350.609	332.249	426.007	488.536	527.292
Toraja Utara	156.006	361.126	372.009	420.230	509.380

Sumber: Direktorat Jendral Pajak dan Keuangan (diolah)

**7.2 Realisasi Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2009-2013 (Juta Rupiah)**

Kabupaten/Kota	2009	2010	2011	2012	2013
Bantaeng	98.153	81.634	108.863	76.193	145.444
Barru	220.853	99.539	157.856	107.619	122.547
Bone	204.070	89.002	132.148	194.151	254.432
Bulukumba	120.856	99.858	139.172	100.510	147.498
Enrekang	188.830	100.345	101.766	92.860	103.503
Gowa	215.696	182.529	141.260	146.109	312.270
Jeneponto	94.445	107.587	137.513	97.159	142.306
Luwu	108.500	1.099.540	161.545	109.453	158.234
Luwu Utara	94.670	77.102	145.055	1.229.680	140.476
Maros	121.392	47.490	125.213	131.299	280.252
Pangkep	187.130	135.097	150.395	160.017	208.220
Pinrang	150.415	127.183	177.216	141.710	144.059
Kep. Selayar	150.428	68.819	79.220	85.078	190.690
Sidrap	158.886	110.302	127.721	80.113	161.388
Sinjai	155.799	109.488	119.061	88.941	114.676
Soppeng	132.711	77.303	111.147	78.924	137.068
Takalar	94.682	93.469	108.410	98.101	10.892
Tana Toraja	91.857	68.881	166.152	153.048	146.990
Wajo	190.450	151.246	207.352	215.353	256.184
Pare-pare	104.149	133.780	122.710	79.295	133.344
Makassar	197.717	176.732	168.524	318.618	392.222
Palopo	134.783	74.542	115.120	97.877	256.184
Luwu Timur	419.034	167.867	167.535	228.946	321.228
Toraja Utara	12.911	97.898	98.598	141.889	174.275

Sumber: Direktorat Jendral Pajak dan Keuangan (diolah)

7.3 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013 (%)

Kabupaten/Kota	2009	2010	2011	2012	2013
Bantaeng	7,61	7,90	8,43	8,49	8,82
Barru	5,72	6,54	7,41	7,77	7,81
Bone	7,51	7,63	6,20	8,01	6,09
Bulukumba	6,47	6,27	6,38	8,97	8,01
Enrekang	6,62	4,99	6,91	7,18	6,96
Gowa	7,99	6,05	6,20	7,28	7,78
Jeneponto	5,38	7,25	7,32	7,27	6,97
Luwu	6,82	6,95	7,47	7,49	7,78
Luwu Utara	6,68	5,93	7,29	8,03	8,17
Maros	6,27	7,03	7,57	8,00	8,67
Pangkep	5,91	6,34	9,17	9,61	7,93
Pinrang	7,65	6,22	7,12	8,27	6,81
Kep. Selayar	7,89	8,01	8,52	9,18	9,47
Sidrap	6,66	4,45	11,82	8,37	7,44
Sinjai	7,02	6,03	5,90	6,33	7,29
Soppeng	6,81	4,45	7,95	7,48	7,57
Takalar	6,58	6,85	7,34	7,40	7,33
Tana Toraja	6,10	6,31	7,88	8,02	7,57
Wajo	5,10	5,71	10,93	8,71	8,01
Pare-pare	8,09	8,25	7,80	7,92	8,47
Makassar	9,20	9,83	9,65	9,88	8,91
Palopo	7,86	7,29	8,16	8,68	8,99
Luwu Timur	-4,04	15,39	-6,62	4,97	9,62
Toraja Utara	5,74	7,00	7,90	8,47	8,51

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010-2014

7.4 Indeks Williamson Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013

Kabupaten/Kota	2009	2010	2011	2012	2013
Bantaeng	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
Barru	0,01	0,03	0,03	0,03	0,03
Bone	0,02	0,05	0,05	0,04	0,05
Bulukumba	0,03	0,05	0,06	0,05	0,05
Enrekang	0,02	0,03	0,03	0,03	0,02
Gowa	0,08	0,11	0,11	0,11	0,12
Jeneponto	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10
Luwu	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02
Luwu Utara	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02
Maros	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07
Pangkep	0,12	0,08	0,09	0,09	0,09
Pinrang	0,07	0,05	0,05	0,05	0,04
Kep. Selayar	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02
Sidrap	0,03	0,00	0,01	0,01	0,01
Sinjai	0,02	0,00	0,01	0,01	0,01
Soppeng	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Takalar	0,05	0,07	0,07	0,07	0,08
Tana Toraja	0,07	0,08	0,07	0,07	0,07
Wajo	0,06	0,03	0,04	0,04	0,04
Pare-pare	0,03	0,02	0,01	0,01	0,01
Makassar	0,60	0,50	0,50	0,51	0,49
Palopo	0,03	0,01	0,01	0,01	0,00
Luwu Timur	0,12	0,31	0,29	0,27	0,28
Toraja Utara	0,07	0,07	0,07	0,07	0,06

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan (diolah)

Lampiran 2

8.1 Hasil uji Chow Test

Redundant Fixed Effects Tests

Pool: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	5.111218	(23,94)	0.0000
Cross-section Chi-square	97.344532	23	0.0000

Sumber: Eviews 8.0 (diolah)

Hipotesis:

H_0 : Model PLS

H_1 : Model FEM

Kesimpulan:

Nilai F statistik adalah 5,11 dengan nilai tabel pada df (23,94) $\alpha = 0,05$ adalah 1,64 sehingga F statistik > F tabel, maka H_0 di tolak sehingga model data yang digunakan adalah Fixed Effect Model.

8.2 Hasil uji Hausman Test

Correlated Random Effects - Hausman Test

Pool: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	8.076647	2	0.0176

Sumber: Eviews 8.0 (diolah)

Hipotesis:

H_0 : Model FEM

H_1 : Model REM

Kesimpulan:

Nilai probabilitas *cross section random* sebesar 0,017 dimana $\alpha = 0,05$ lebih besar, sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang tepat untuk digunakan adalah *Fixed Effect Model*.

8.3 Hasil pengujian untuk perhitungan statistik pengaruh X_1 , X_2 terhadap Y_1

Dependent Variable: Y1?
 Method: Pooled Least Squares
 Date: 01/06/15 Time: 01:06
 Sample: 2009 2013
 Included observations: 5
 Cross-sections included: 24
 Total pool (balanced) observations: 120

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	21.67604	1.173368	18.47336	0.0000
X1?	0.197692	0.046023	4.295474	0.0000
X2?	0.020524	0.008996	2.281385	0.0248
Fixed Effects (Cross)				
_A—C	-0.241021			
_B—C	-0.220371			
_C—C	0.470973			
_D—C	0.157507			
_E—C	-0.131237			
_F—C	0.170924			
_G—C	0.005341			
_H—C	0.056958			
_I—C	0.046906			
_J—C	0.024682			
_K—C	0.019366			
_L—C	0.063051			
_M—C	-0.178764			
_N—C	-0.024495			
_O—C	-0.058167			
_P—C	0.035412			
_Q—C	0.051259			
_R—C	-0.101154			
_S—C	0.131282			
_T—C	-0.255958			
_U—C	0.545350			
_V—C	-0.146513			
_W—C	-0.179889			
_X—C	-0.241443			

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.690821	Mean dependent var	26.88356
Adjusted R-squared	0.608593	S.D. dependent var	0.306324
S.E. of regression	0.191644	Akaike info criterion	-0.277214
Sum squared resid	3.452392	Schwarz criterion	0.326742
Log likelihood	42.63285	Hannan-Quinn criter.	-0.031945
F-statistic	8.401239	Durbin-Watson stat	0.990624
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Eviews 8.0

Lampiran 3

9.1 Hasil uji Chow Test

Redundant Fixed Effects Tests

Pool: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	134.103409	(23,93)	0.0000
Cross-section Chi-square	423.745469	23	0.0000

Sumber: Eviews 8.0 (diolah)

Hipotesis:

H_0 : Model PLS

H_1 : Model FEM

Kesimpulan:

Nilai F statistik adalah 134,103 dengan nilai tabel pada df (23,94) $\alpha = 0,05$ adalah 1,64 sehingga F statistik > F tabel, maka H_0 di tolak sehingga model data yang digunakan adalah Fixed Effect Model.

9.2 Hasil uji Hausman Test

Correlated Random Effects - Hausman Test

Pool: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	14.910586	3	0.0019

Sumber: Eviews 8.0 (diolah)

Hipotesis:

H_0 : Model FEM

H_1 : Model REM

Kesimpulan:

Nilai probabilitas *cross section random* sebesar 0,0019 dimana $\alpha = 0,05$ lebih kecil, sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang tepat untuk digunakan adalah *Random Effect Model*.

9.3 Hasil pengujian untuk perhitungan statistik pengaruh X_1 , X_2 , Y_1 terhadap Y_2

Dependent Variable: Y2?

Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)

Date: 02/04/15 Time: 21:41

Sample: 2009 2013

Included observations: 5

Cross-sections included: 24

Total pool (balanced) observations: 120

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.233168	0.245733	0.948866	0.3447
X1?	0.002571	0.010019	0.256642	0.7979
X2?	-0.009967	0.004909	-2.030361	0.0446
Y1?	0.003275	0.000902	3.630477	0.0004
Random Effects (Cross)				
_A--C	-0.057711			
_B--C	-0.042960			
_C--C	-0.027201			
_D--C	-0.023817			
_E--C	-0.043174			
_F--C	0.038525			
_G--C	0.026920			
_H--C	-0.055003			
_I--C	-0.055835			
_J--C	-0.004481			
_K--C	0.023299			
_L--C	-0.017674			
_M--C	-0.050541			
_N--C	-0.060499			
_O--C	-0.058952			
_P--C	-0.069208			
_Q--C	-0.009307			
_R--C	0.000682			
_S--C	-0.026411			
_T--C	-0.058007			
_U--C	0.441934			
_V--C	-0.061662			
_W--C	0.198976			
_X--C	-0.007895			

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		0.089357	0.9579
Idiosyncratic random		0.018728	0.0421

Weighted Statistics			
R-squared	0.120917	Mean dependent var	0.006657
Adjusted R-squared	0.098182	S.D. dependent var	0.020708
S.E. of regression	0.019666	Sum squared resid	0.044861
F-statistic	5.318574	Durbin-Watson stat	1.182221
Prob(F-statistic)	0.001805		

Hasil pengujian untuk perhitungan statistik pengaruh X_1 , X_2 , Y_1 terhadap Y_2

Unweighted Statistics			
R-squared	-0.017610	Mean dependent var	0.071333
Sum squared resid	1.431764	Durbin-Watson stat	0.037042

Sumber: Eviews 8.0

Lampiran 4

DATA DIRI

Nama : Mirah Midadan
 Tempat, Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 13 September 1993
 Alamat : Jl. Sastra 1 A.27, Komp. UNHAS Antang
 Nomor Handphone : +6281340813349
 Email : mirah.midadan@aiesec.net



PENDIDIKAN FORMAL

2011 – Sekarang : Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin
 2008 – 2011 : SMA Negeri 5 Makassar

PRESTASI

November – Desember 2014 : Participant of Student Exchange Program in Kyoto University, Japan. As representative from Economic and Business Faculty of Hasanuddin University.
 Juni – Agustus 2014 : Salah satu peserta terpilih dalam *pilot project* KKN Tematik Jogja, kerjasama antara UPT KKN UNHAS dan LPPM UGM.
 2014 : Peserta MAWAPRES tingkat universitas mewakili Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
 Juni – Agustus 2013 : Youth Ambassador of Indonesia in Ukraine.

Makassar, 24 Februari 2015

Mirah Midadan